

**PELAKSANAAN PROGRAM
KAMPUNG KELUARGA BERENCANA
SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA
KECIL BERKUALITAS**

**(Studi Pada Kampung Keluarga Berencana Kelurahan Kedundung
Kecamatan Magersari Kota Mojokerto)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**AYU MUTIARAWATI
NIM. 145030100111025**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2018**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana Sebagai
Upaya Mewujudkan Keluarga Kecil Berkualitas (Studi Pada
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga
Berencana)

Disusun oleh : Ayu Mutiarawati

NIM : 145030100111025

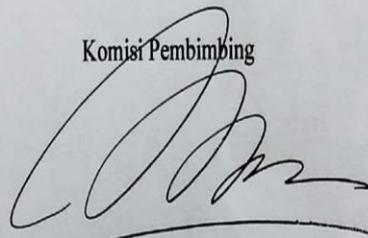
Fakultas : Ilmu administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi :-

Malang, 11 Mei 2018

Komisi Pembimbing



Dr. Mochamad Makmur, MS

NIP. 19511028 198003 1 002

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

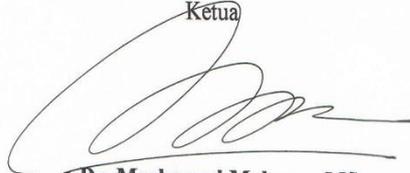
Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 7 Juni 2018
Jam : 09.00 WIB
Skripsi atas nama : Ayu Mutiarawati
Judul : Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana
Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Kecil Berkualitas
(Studi Pada Kampung Keluarga Berencana Kelurahan
Kedundung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto)

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua



Dr. Mochamad Makmur, MS
NIP. 19511028 198003 1 002

Anggota



Dr. Mochamad Rozikin, M.AP
NIP. 19630503 198802 1 001

Anggota



Niken Lastiti V. A., S.AP., M.AP
NIP. 19810210 200501 2 002



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip oleh naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan serta daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia jika skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 11 Mei 2018

Mahasiswa



Ayu Mutiarawati

145030100111025

CURUCULUM VITAE

DATA DIRI

1. Nama : Ayu Mutiarawati
2. Tempat, Tanggal Lahir : Lampung, 18 Agustus 1995
3. Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
4. NIM : 145030100111025
5. Alamat : Ds. Kintelan RT 1 RW 2 Kecamatan
Puri Kabupaten Mojokerto
6. Jenis Kelamin : Perempuan
7. Agama : Islam
8. Telepon : 082132155465
9. Email : ayumutiara58@gmail.com



PENDIDIKAN

1. SDN Kintelan 1 Kecamatan Puri (2002-2008)
2. SMP Negeri 2 Sooko (2008-2011)
3. SMA Negeri 1 Bangsal (2011-2014)
4. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (2014-2018)

RIWAYAT ORGANISASI DAN KEPANITIAAN

1. Staf Anggota Keputrian FORKIM FIA UB tahun 2014-2015
2. Bendahara Pelaksana dalam acara Seminar Nasional Brawijaya Green Festival tahun 2015
3. Staff Divisi Kestari dalam acara Seminar Beauty Inside Beauty Outside tahun 2015

LEMBAR PERSEMBAHAN

Terimakasih Alhamdulillah Kepada Allah SWT Atas
Kelancaran Dan Kemudahan Yang Telah Diberikan-Nya Sehingga
Skripsi Ini terselesaikan.

Skripsi Ini Aku Persembahkan Kepada Kedua Orang Tua
Kandungku, Orangtua Angkatku, Adik-Adikku, Kakak-Kakakku
Dan Teman-Teman Dekatku Yang Telah Memberikan Doa Dan
Kasih Sayang Yang Tidak Pernah Putus Serta Semangat
Untuk Tidak Menyerah.

RINGKASAN

Ayu Mutiarawati, 2018, **Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Kecil Berkualitas (Studi Pada Kampung Keluarga Berencana Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto).**

Ketua Komisi Pembimbing: Dr. Mochamad Makmur, MS

Pertumbuhan penduduk saat ini semakin bertambah terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Indonesia memiliki jumlah penduduk terbanyak dengan menempati posisi ke empat didunia, jika pertumbuhan tidak dikendalikan maka akan berdampak pada ledakan penduduk. Untuk itu dibuatlah program Kampung Keluarga Berencana sebagai upaya menggalakan kembali program Kampung KB sekaligus usaha pemerintah untuk mengendalikan kelahiran. Program yang dicanangkan Presiden ini diterapkan di daerah yang akseptor KB nya rendah dan memiliki jumlah penduduk banyak. Di Kota Mojokerto program ini merupakan program yang baru terbentuk pada tahun 2016 dan dibentuk di lingkungan Randegan RW 1 Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari. Dalam pelaksanaannya terdapat Kelompok kegiatan yakni Bina Keluarga Balita dan Bina Keluarga Remaja.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Memfokuskan permasalahan pada Pelaksanaan Program Kampung KB dengan menggunakan pendekatan teori oleh David C. Korten yang mencakup tiga unsur yaitu program, pemanfaat dan organisasi. Selain itu menggunakan teori yang berkaitan dengan program Kampung KB. Penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Model analisis data yang digunakan adalah model analisis Miles, Huberman, dan Saldana yang terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan program Kampung KB dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas di Lingkungan Randegan Kelurahan Kedundung sejauh ini berjalan dengan lancar, namun masih terdapat kekurangan yang terjadi di lapangan. Hal ini dikarenakan dana untuk kegiatan masih kurang dan Kampung KB belum menjalin kerjasama dengan swasta sehingga dana untuk kegiatan diperoleh dari swadya masyarakat. Kemudian untuk kelompok kegiatan masih belum terbentuk untuk khusus keluarga lansia dan kader-kader untuk kelompok kegiatan sebagian sudah lanjut usia sehingga sulit dalam menyampaikan sosialisasi maupun saat kegiatan diadakan. Saran yang diberikan oleh peneliti yaitu membentuk kelompok kegiatan dan kader baru yang memiliki potensi dan kemampuan. Serta para pelaksana Kampung KB gencar untuk menjalin kerjasama dengan swasta sehingga nanti memudahkan dalam hal pendanaan.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Kampung KB, Dana Kegiatan

SUMMARY

Ayu Mutiarawati, 2018, **The implementation of the program family planning village as the pursuit of small family quality (Study In The Family Planning Village Kedundung Village, Magersari District, Mojokerto City).**

Head of Supervising Commision: Dr. Mochamad Makmur, MS

Population growth currently increasing especially in developing countries such as Indonesia. Indonesia has the largest population with fourth position in the world, if growth is not controlled it will be impacted on population explosion. For that, the government has built the village program family planning as an effort to of dengue back from program family planning and government efforts to control birth. The program launched by the President is applied in areas with low family planning acceptors and has a large population. In the city of Mojokerto areas this insurance program is a it is a new program formed in the year 2016 and formed in the vicinity of the Randegan RW 1 Kedundung urban village Magersari sub district. In the implementation there are groups of activities namely of bina keluarga balita and bina keluarga remaja.

In this research used qualitative method with the descriptive approach. Focusing on the problem implementation of the village program KB by using the theory approach by David C. Korten which includes three elements namely the program, beneficiaries and organization. In addition use the theory pertaining to program family planning village. The research is done through observation, interview, and documentation. Data analysis model that is used is data analysis by Miles, Huberman, and Saldana which consists of data collection, data condensation, presentation of data, and conclusion.

The research results showed that the implementation of the village program KB in the pursuit of small family quality in the neighborhood Randegan Kedundung urban village so far run smoothly, but still there is a shortage of happens on the field. It was because funds for the is weak and their family planning not established cooperation with the private sector so funds for the activities are obtained from swadya the community. Then for the groups of activities are still have not yet been formed for the special of elderly family and kader-kader to groups of activities some have been that it is indeed hard and continuing through old age in the dissemination of the socialization or celebration on today the match will be held. Advice provided by researchers that is to form groups of activities and kader the new one which has potential and skill. As well as the implementers of family planning village aggressively to establish cooperation with the private sector making it easier in terms of funding.

Keyword: Implementation, Family planning village, Fund activities



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas limpahan dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Program Kampung KB Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Kecil Berkualitas (Studi Pada Kampung Keluarga Berencana Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto)”**. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Keberhasilan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Fadillah Amin, Dr.,M.AP.,Ph.D selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Dr. Mochamad Makmur, MS selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, nasehat serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmu kepada peneliti selama ini.

6. Bapak Djunaidi selaku Kepala Bidang KB DP3AKB Kota Mojokerto yang telah membantu peneliti dan meluangkan waktunya dalam mendapatkan data. Ibu Asminarti selaku pegawai lapangan KB DP3AKB Kota Mojokerto dan Bapak Matali selaku Pembina Kampung KB Kelurahan Kedundung yang telah mendampingi peneliti di lapangan dan telah membantu meluangkan waktunya dalam mendapatkan data.
7. Bapakku tercinta Bapak Mukayat, S.Pd yang setia mendengarkan cerita dari awal sampai akhir pengerjaan skripsi, yang membantu mengarahkan, yang selalu memberikan doa motivasi untuk tidak mudah menyerah menggapai mimpi dan yang selalu memberikan nasihat untuk tidak lupa dengan kewajiban. Ibuku tersayang Ibu Darwati yang selalu memberikan doa, nasihat dan semangat untuk tidak menyerah dalam menggapai mimpi.
8. Kedua orang tua angkat Bapak Majid dan Ibu Susiani yang selalu memberikan doa.
9. Adik-adik tersayang Dewi Yunita, Muhtiar Ali Asba dan Muhammad Fadil Zayn yang selalu memberikan doa dan memberikan semangat berjuang untuk menggapai mimpi. Kakak-kakak ku Yosep Sudarmono, Saiful Abidin dan Dewijah yang selalu memberikan doa, mendengarkan ceritaku dan yang selalu menyemangati selama masa studiku.
10. Keluarga besar dari kedua orang tua kandung dan orang tua angkat yang selalu memberikan doa dan semangat selama ini dan sepupuku Fitrotun Nisa yang selama ini bersedia mengantar dan menemaniku selama berjalannya penelitian.

11. Teman-teman Bikini Bottom (Syaifuddin, Yaqi, Edi, Ariza, Silvi, Alfi, Evi) yang telah memberikan doa dan semangat kepada penulis.
12. Teman-teman Calon Istri Sholehah (Alfi, Anggi, Putri Retno, Putri Wiji, Silvia) yang saling mendukung dan memberikan semangat.
13. Teman-teman dari Geng Cecurut (Deni, Udin, Ridho, Pricel, Asri, Nilla, Okta) yang saling memberikan dukungan dan semangat satu sama lain.
14. Teman-teman dari Grup Magang Ceria (Amin, Dara, Galang, Catur) yang saling mendoakan dan saling memberikan semangat. Teman-teman Grup Halaqoh (Mbk Aulia, Mukhi, Ummy, Fanny, Lilin, Elli, Dita, Yenita, Inge) yang telah memberikan doa dan semangat kepada penulis.
15. Teman-teman di Jurusan Administrasi Publik Tety, Klara dan Durin yang saling membantu, mendoakan dan menyemangati penulis dalam mengerjakan skripsi. Teman-teman di Jurusan Administrasi Publik angkatan 2014 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan semangat sehingga penelitian skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari kekurangan dan kelemahan yang ada dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis juga mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak

Malang, 11 Mei 2018

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kontribusi Penelitian	9
E. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs).....	12
1. Konsep <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs).....	12
B. Kebijakan Publik.....	14
1. Pengertian Kebijakan Publik.....	14
2. Implementasi Kebijakan Publik	16
3. Model Implementasi Kebijakan Publik.....	16
C. Program.....	19
1. Pengertian Program	19
2. Pelaksanaan Program	21
3. Evaluasi Program	24
D. Kampung Keluarga Berencana	26
1. Pengertian Kampung KB	26
2. Tujuan Umum Kampung KB	26
3. Tujuan Khusus Kampung KB	27
4. Prasyarat Wajib Pembentukan Kampung KB	28
5. Ruang Lingkup Kegiatan Kampung KB	29
6. Sasaran Kampung KB	29
7. Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB	30
8. Perencanaan Program dan Kegiatan Kampung KB.....	32
9. Tahapan Operasional Pelaksanaan Kegiatan.....	33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	36
B. Fokus Penelitian.....	37
C. Lokasi dan Situs penelitian	38
D. Sumber Data.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Instrumen Penelitian	43
G. Analisis Data.....	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

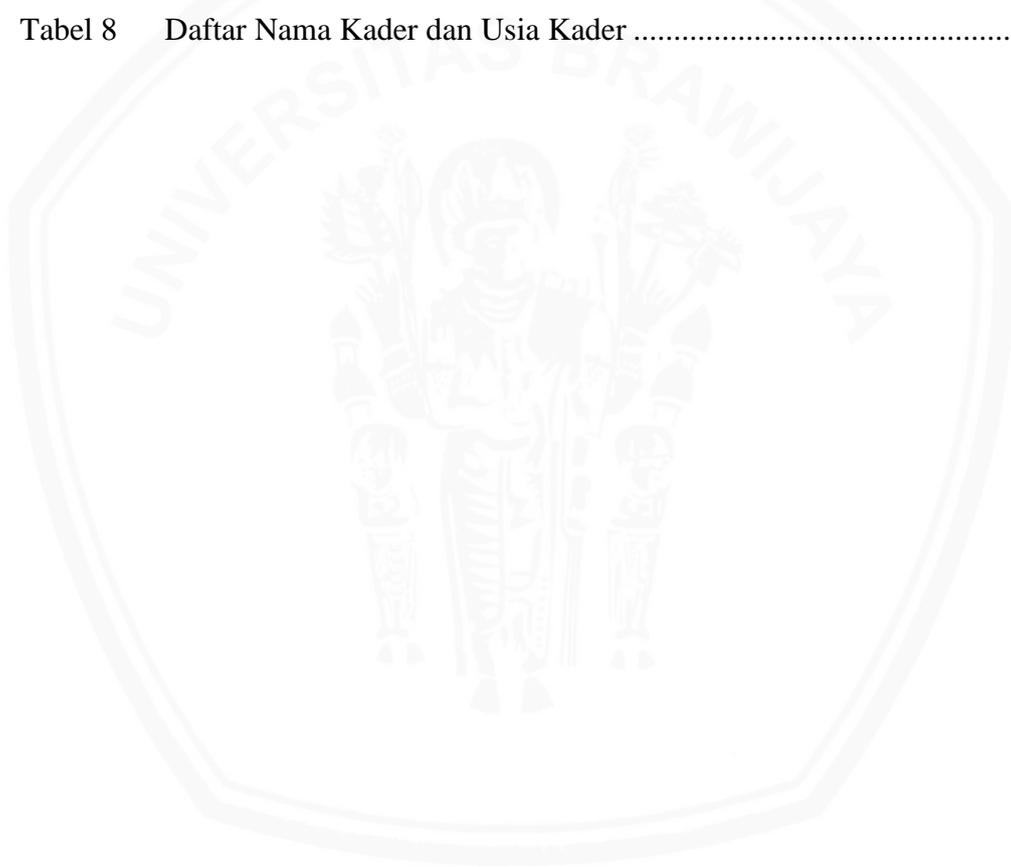
A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian	46
1. Gambaran Umum Kota Mojokerto	46
a. Kondisi Geografis Kota Mojokerto.....	46
b. Kondisi Kependudukan dan Ketenagakerjaan	47
c. Kondisi Pendidikan dan Kesehatan.....	49
2. Gambaran Umum Kecamatan Magersari.....	50
a. Visi Misi Kecamatan Magersari.....	50
b. Kondisi Geografis	51
c. Kondisi Demografis	52
B. Penyajian Data	53
1. Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Kecil Berkualitas	53
a. Kegiatan di Kampung KB.....	54
b. Penganggaran Kegiatan.....	69
c. Evaluasi Program	71
d. Koordinasi Lintas Sektor Dan Kemitraan.....	78
2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Kecil Berkualitas.....	83
a. Faktor Pendukung	84
b. Faktor Penghambat.....	89
C. Pembahasan Data	94
1. Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Kecil Berkualitas	94
a. Kegiatan di Kampung KB.....	99
b. Penganggaran Kegiatan.....	103
c. Evaluasi Program	105
d. Koordinasi Lintas Sektor Dan Kemitraan.....	108
2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Kecil Berkualitas.....	109
a. Faktor Pendukung	109
b. Faktor Penghambat.....	111

BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	113
B. Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN.....	120



DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
Tabel 1	Tingkat Kepadatan Penduduk (Jiwa/KM ²) Tahun 2014	52
Tabel 2	Keikutsertaan Balita Dalam Kegiatan Posyandu Tahun 2017	60
Tabel 3	Keikutsertaan Keluarga Remaja Dalam Kegiatan BKR	67
Tabel 4	Jumlah PUS Menurut Kelompok Umur Tahun 2016.....	72
Tabel 5	Jumlah PUS Menurut Kelompok Umur Tahun 2017.....	74
Tabel 6	Keikutsertaan Ber KB Per Mix Kontrasepsi Tahun 2016.....	76
Tabel 7	Keikutsertaan Ber KB Per Mix Keikutsertaan Tahun 2017.....	76
Tabel 8	Daftar Nama Kader dan Usia Kader	93



DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
Gambar 1	Jumlah Penduduk Kota Mojokerto Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2016	6
Gambar 2	Model Kesesuaian Implementasi Program.....	22
Gambar 3	Struktur Organisasi Kampung KB	31
Gambar 4	Komponen Analisis Data Model Interaktif.....	44
Gambar 5	Peta Wilayah Kota Mojokerto.....	46
Gambar 6	Perbandingan Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kota Mojokerto (Km ²) Tahun 2016	47
Gambar 7	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Di Kota Mojokero Tahun 2016.....	48
Gambar 8	Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan Di Kota Mojokerto Tahun 2016	50
Gambar 9	Struktur Organisasi BKB CERIA Kampung KB	56
Gambar 10	Sosialisasi Tentang Kebutuhan Gizi Keluarga.....	58
Gambar 11	Posyandu Di Kampung KB Lingkungan Randegan RW 1	60
Gambar 12	Materi Kegiatan Permainan Halus dan Kasar	62
Gambar 13	Struktur Organisasi BKR MERPATI.....	64
Gambar 14	Plakat Kampung KB Di Lingkungan Randegan RW 1.....	71
Gambar 15	Pembina Kampung KB Bersama Pihak Kepoisian Setempat Dalam Acara BKR MERPATI	82
Gambar 16	Kounikasi Antara Kader, Koordinator Lapangan Dan Pembina Kampung KB	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Suartha (2016:1) penduduk merupakan kumpulan orang-orang atau individu yang bertempat tinggal di suatu wilayah dan tercatat secara administrasi. Setiap hari kumpulan orang-orang ini terus bertambah yang kemudian bisa mengakibatkan ledakan penduduk. Ledakan penduduk adalah suatu pertumbuhan penduduk di suatu negara secara cepat dan tiba-tiba serta tidak terkendali. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali tanpa diikuti dengan kualitas sumber daya manusia akan memberikan dampak pada peningkatan kebutuhan sumber daya air, pangan dan energi yang luar biasa yang besar kemungkinannya akan berdampak pada konflik sosial dan bencana lainnya. Jumlah penduduk yang terus meningkat merupakan masalah besar bagi negara di dunia khususnya negara berkembang. Indonesia menjadi salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Berdasarkan data Departemen Perdagangan Amerika Serikat melalui biro sensusnya, pada tahun 2014 Indonesia menempati posisi ke-4 dengan jumlah penduduk mencapai 253,60 juta jiwa. Sementara dibandingkan pada tahun 2010 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk Indonesia sebanyak 237.641.326 juta jiwa. Berarti dalam jangka 4 tahun terjadi penambahan jumlah penduduk sebanyak $\pm 16.000.000$ juta jiwa. Artinya jika ini terus dibiarkan maka pada tahun mendatang tidak menutup kemungkinan akan terjadi ledakan penduduk yang tidak terkendali.

Berdasarkan hal tersebut pemerintah pusat melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memiliki tugas dalam pengendalian penduduk. Mengingat dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai dasar pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana menekankan kewenangan BKKBN tidak hanya terbatas pada masalah Pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera saja namun juga menyangkut masalah pengendalian penduduk. Dengan adanya kewenangan tersebut BKKBN bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam menekan laju pertumbuhan penduduk. Kerjasama dilakukan mengingat adanya pembagian urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana pada lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Konkruen antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota pada huruf N. Sehingga di setiap daerah terdapat perwakilan BKKBN.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan lembaga yang berstatus sebagai lembaga pemerintahan non kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang bertanggungjawab di bidang kesehatan. BKKBN terus berupaya mewujudkan visi sebagai lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas. Upaya tersebut dilakukan dalam bentuk penyuluhan-penyuluhan, kampanye-kampanye dan membuat program/kegiatan untuk masyarakat. Salah satu program BKKBN yakni program keluarga berencana

(Program KB). Sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dapat disimpulkan bahwa program keluarga berencana adalah upaya yang dilakukan untuk mengatur kelahiran anak, jarak, dan usia ideal melahirkan, serta mengatur kehamilan.

Program KB begitu gencar dan bergaung di masyarakat hingga adanya slogan “Dua Anak Cukup” dapat ditemukan dimana-mana. Hal ini membuat kesuksesan program KB yang dilaksanakan sejak tahun 1970 sukses berjalan. Angka kelahiran dan laju pertumbuhan penduduk pun menurun berhasil mencegah 100 juta kelahiran penduduk dalam tiga dekade. Akan tetapi prestasi tersebut tak dapat dipertahankan karena angka kelahiran hingga tahun 2002 2,6 juta per wanita, tak juga turun sampai tahun 2012 (www.liputan6.com diakses tanggal 27 Oktober 2017). Ada beberapa yang menyebabkan tidak berhasilnya program KB pada tahun 2000 sampai 2010 yakni program KB dianggap produk orde baru jadi tidak perlu didukung. Kebijakan politik berupa desentralisasi daerah, sehingga banyak dari kabupaten dan kota tidak menjalankan program KB. Berdasarkan hal tersebut BKKBN berupaya menggalakkan kembali program KB untuk mengendalikan jumlah penduduk sekaligus sebagai upaya mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty bahwa “generasi yang berkualitas dapat diukur dari kompetensi dan karakter. Terwujudnya karakter itu harus dilakukan oleh ayah dan ibu serta dimulai sejak anak masih berada dalam kandungan. Untuk itu program keluarga berencana harus kembali digaungkan. Dua anak cukup membuat ibu punya waktu untuk

memberikan asah, asih dan asuhnya. Keluarga juga harus dibangun untuk menemukan karakter dan kompetensi” (www.cnnindonesia.com diakses tanggal 27 November 2017).

Disisi lain BKKBN diberi mandat oleh Presiden untuk turut mensukseskan Agenda Prioritas Pembangunan (nawacita). Berdasarkan nawacita Presiden Republik Indonesia terutama pada agenda nomor 5 (lima) “meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia” melalui pembangunan kependudukan dan keluarga berencana dan nawacita nomor 3 (tiga) “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka kesatuan”. Serta melaksanakan Strategi Pembangunan Nasional 2015-2019 untuk Dimensi Pembangunan Manusia pada Pembangunan Bidang Kesehatan dan Mental/Karakter (Revolusi Mental). Lebih lanjut BKKBN dituntut untuk dapat melakukan berbagai langkah penguatan program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang benar-benar memiliki daya ungkit terhadap upaya pencapaian target/sasaran, serta penguatan kegiatan-kegiatan prioritas secara komprehensif dan berkelanjutan di seluruh tingkatan wilayah. Dalam upaya menjalankan amanat Presiden sekaligus upaya mencapai agenda nawacita nomor 5 (lima) dan 3 (tiga), BKKBN membuat program yang memiliki pengaruh penting yakni program Kampung Keluarga Berencana (KB). Program Kampung KB ini menjadi ikon BKKBN yang dapat secara langsung bersentuhan dan memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia di seluruh tingkatan wilayah.

Program Kampung KB merupakan program inovasi strategis yang dirancang agar lebih dekat dalam melayani masyarakat. Berdasarkan petunjuk teknis Kampung KB tahun 2015, Kampung KB didefinisikan sebagai satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara, yang memiliki kriteria tertentu, dimana terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan. Sesuai dengan nawacita nomor 3 (tiga) maka program Kampung KB diterapkan didaerah kumuh, miskin, dan banyak terdapat anak, sehingga nantinya pembangunan berwawasan kependudukan dapat dilaksanakan di tempat itu bersama warga setempat.

Program Kampung KB terbentuk di seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Indonesia. Hingga Triwulan III 2017, tercatat sudah terbentuk 5.505 Kampung KB. Di tingkat Kecamatan sekitar 4.754 Kecamatan sudah memiliki Kampung KB. Ini berarti tinggal 34% lagi dari jumlah Kecamatan di Indonesia yang secara keseluruhan mencapai 7.160 Kecamatan yang belum memiliki Kampung KB (BKKBN, 2018). Sementara itu salah satu Provinsi di Indonesia yakni Provinsi Jawa Timur, di 38 Kabupaten dan Kota di Jawa Timur Pemerintah menargetkan 664 Kampung KB pada 2017-2018 di tingkat Kecamatan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala BKKBN Jawa Timur yang mengatakan bahwa memasuki 2018 BKKBN Jawa Timur meningkatkan jumlah Kampung KB agar bisa menyebar di semua kampung yang tergolong miskin. Setidaknya, 50 persen dari jumlah kampung miskin di Jawa Timur harus ada Kampung KB nya. Keberadaan Kampung KB di Jawa Timur memberi nilai tambah pada kemajuan kampung. Tak

hanya meningkatkan kesadaran masyarakat ber-KB” (surabaya.tribunnews.com diakses pada tanggal 27 Oktober 2017).

Kota Mojokerto merupakan salah satu Kota di Jawa Timur yang sudah membentuk Kampung KB, tepatnya di Lingkungan Randengan RW 1 Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari. Terpilihnya Kelurahan Kedundung sebagai lokasi Kampung KB salah satunya karena memiliki jumlah penduduk banyak, hal ini sesuai dengan tujuan program yakni menekan laju pertumbuhan penduduk. Sehingga Kampung KB dibentuk di lokasi yang memiliki jumlah penduduk terbanyak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto Tahun 2016, Kelurahan Kedundung berada pada posisi dua, dengan jumlah penduduk terbanyak diantara kelurahan lainnya. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Kecamatan Subdistrict	Jenis Kelamin/Gender			Persentase Percentage
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
010. Prajurit Kulon	20 498	20 788	41 286	29,46
001. Surodinawan	4 178	4 227	8 405	6,00
004. Prajurit Kulon	4 129	4 024	8 153	5,82
005. Blooto	3 107	3 076	6 183	4,41
006. Mentikan	3 645	3 869	7 514	5,36
007. Kauman	1 564	1 718	3 282	2,34
008. Pulorejo	3 875	3 874	7 749	5,53
020. Magersari	29 788	30 270	60 058	42,85
002. Gunung Gedangan	3 660	3 633	7 293	5,20
003. Kedundung	7 919	7 699	15 618	11,14
004. Balongsari	3 937	3 988	7 925	5,65
008. Gedongan	1 116	1 194	2 310	1,65
009. Magersari	2 943	3 099	6 042	4,31
010. Wates	10 213	10 657	20 870	14,89
021. Kranggan	19 201	19 616	38 817	27,69
001. Kranggan	6 475	6 629	13 104	9,35
002. Meri	4 340	4 348	8 688	6,20
003. Jagalan	1 580	1 678	3 258	2,32
004. Miji	4 606	4 684	9 290	6,63
005. Sentanan	1 181	1 275	2 456	1,75
006. Purwotengah	1 019	1 002	2 021	1,44
Mojokerto	69 487	70 674	140 161	100,00

Gambar 1. Jumlah Penduduk Kota Mojokerto berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2016

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto

Selain itu terpilihnya Kelurahan Kedundung sebagai Kampung KB juga berdasarkan kajian dan analisis berbagai indikator diantaranya yaitu laju pertumbuhan penduduk, minimnya kepesertaan KB dan tingkatan keluarga sejahtera. Kelurahan Kedundung memang memiliki catatan minor soal gerakan KB, angka akseptornya sangat minim. Kemudian Kelurahan Kedundung merupakan kawan kumuh, lingkungannya kurang bersih dan tidak tertata. Didukung pula oleh pernyataan Walikota Mojokerto yang mengatakan bahwa “kita tidak memilih kampung yang sudah bagus dalam hal pengendalian penduduk dan KB, justru sebaliknya kita pilih kampung yang banyak permasalahan” (Harian buana.com, diakses pada tanggal 11 Desember 2017).

Kampung KB di Lingkungan Randengan RW 1 telah diresmikan secara langsung oleh Kepala BKKBN Republik Indonesia, Surya Chandra Surapaty bersama Walikota Mojokerto Mas'ud Yunus pada hari senin tanggal 28 Maret 2016. Keberadaan Kampung KB diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan kependudukan di Kota Mojokerto. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Walikota Mojokerto yang mengatakan bahwa “keberadaan kampung KB ini sudah dipersiapkan BKKBN. Sehingga adanya kampung KB tersebut, diharapkan bisa mengatasi jumlah penduduk, minimnya peserta KB dan tingginya pernikahan dini. Masalah penurunan pertumbuhan penduduk ini harus kita upayakan. Jadi kampung KB nanti, bagaimana ekonominya meningkat, derajat kesejahaterannya meningkat, pendidikan meningkat. Sehingga bisa menjadi keluarga kecil dan berkualitas, itu harapan kita” (www.majamojokerto.com diakses tanggal 18 September 2017).

Akan tetapi di dalam pelaksanaan Kampung KB masih terdapat beberapa kendalanya yakni kurangnya partisipasi masyarakat untuk turut mengikuti kegiatan yang ada di Kampung KB. Masih banyak masyarakat yang belum memahami sepenuhnya fungsi dan tujuan keberadaan Kampung KB di lingkungan tempat tinggal mereka. Sehingga keikutsertaan masyarakat untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan sangat minim. Disisi lain masyarakat di Randengan Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto ini masyarakat yang agamis yang mana masyarakat masih menganggap bahwa KB itu haram. Masyarakat masih berpikir bahwa KB haram, sehingga banyak Pasangan Usia Subur yang belum menjadi akseptor KB. Jika akseptor KB rendah maka dapat memicu terjadinya kehamilan yang tak terencana yang nantinya akan berdampak pada pada meningkatnya jumlah penduduk. Padahal tujuan utama dari dibangunnya Kampung KB untuk menekan laju pertumbuhan penduduk sekaligus sebagai upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Permasalahan lainnya masih banyaknya akseptor KB yang belum bersedia menggunakan KB Metode Jangka Panjang (MJP).

Sehubungan dengan hal yang telah diuraikan maka dapat diketahui dalam pelaksanaan Kampung KB di Lingkungan Randegan RW 1 Kelurahan Kedundung masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Kecil Berkualitas (Studi Pada Kampung Keluarga Berencana Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di latar belakang, maka perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah pelaksanaan program kampung keluarga berencana sebagai upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas di Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto?
2. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program kampung keluarga berencana sebagai upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas di Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dengan adanya penelitian, yaitu:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan program kampung keluarga berencana sebagai upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas di Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program kampung keluarga berencana sebagai upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas di Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto.

D. Kontribusi Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan di atas, hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat atau kegunaan sebagai berikut:

1. Kontribusi Akademis

- a. Bagi mahasiswa hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan memperkaya wawasan yang berkaitan dalam bidang pelayanan kesehatan masyarakat.
- b. Hasil penelitian ini bagi Fakultas Ilmu Administrasi adalah sebagai referensi untuk membandingkan antara peneliti serupa dengan peneliti yang tertarik untuk mengembangkan tema dan permasalahan yang sama.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi pembanding bagi penelitian-penelitian yang telah lalu dan peneliti yang akan melakukan penelitian di masa mendatang dalam topik yang sama.

2. Kontribusi Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah atau instansi terkait untuk mengoptimalkan Program Kampung Keluarga Berencana di Kota Mojokerto.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan atau masukan pemikiran kepada masyarakat terkait berperan pentingnya masyarakat dalam keberhasilan Program Kampung Keluarga Berencana.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan susunan secara keseluruhan dari suatu karya ilmiah secara garis besar agar dapat mempermudah dalam mengetahui isi dari karya ilmiah yang telah disusun. Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan tentang uraian konsep-konsep dan pendapat dari para ahli serta literatur-literatur ilmiah sebagai acuan untuk penelitian tentang pelaksanaan program kampung keluarga berencana.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan metode analisis data yang digunakan dalam melaksanakan penelitian.

BAB IV : HASIL PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai kumpulan dan analisa yang menjadi tujuan utama dari penelitian. Dalam bab ini dikemukakan mengenai data-data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, berkaitan dengan tujuan penelitian sesuai dengan fokus penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dan diimplementasikan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan yang berisi temuan pokok penelitian sesuai dengan tujuan penelitian serta saran-saran yang terkait dengan hasil penelitian yang selanjutnya dapat digunakan sebagai rekomendasi pada penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Sustainable Development Goals* (SDGs)

1. Konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs) melanjutkan konsep pembangunan *Milenium Development Goals* (MDGs). Menurut Bappenas dalam Katalog BPS (2015:13) Konsep SDGs ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015. Hal ini terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu berkurangnya (*depletion*) sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim semakin krusial, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin.

Berdasarkan Katalog Badan Pusat Statistik (2015:13) terdapat tiga pilar utama yang menjadi indikator dalam pembentukan konsep pengembangan SDGs yaitu,

1. Indikator yang melekat pembangunan manusia (*Human Development*), diantaranya pendidikan, kesehatan.
2. Indikator kedua yang melekat pada lingkungan kecilnya (*Social Economic Development*), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi.
3. Indikator ketiga melekat pada lingkungan yang lebih besar (*Environmental Development*), berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik.

Berdasarkan ketiga pilar tersebut, dirincikan kembali ke 17 tujuan yang harus dicapai. Dalam 17 tujuan tersebut, terdapat beberapa target yang berhubungan dengan pembangunan manusia, yaitu tujuan ketiga, tujuan keempat, dan tujuan kedelapan. Tujuan ketiga adalah menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk disegala usia. Tujuan keempat adalah menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua. Sedangkan tujuan kedelapan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua.

Tujuan ketiga adalah menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan di segala usia. Target 3A bertujuan mengakhiri kematian anak, kematian ibu, dan kematian akibat penyakit pada penduduk usia kurang dari 70 tahun. Jika dikaitkan dengan salah satu indikator pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka harapan hidup saat lahir secara tidak langsung akan menjadi salah satu indikator dari SDGs. Secara tidak langsung pula, angka harapan hidup saat lahir akan meningkat jika salah satu indikator SDGs yaitu angka kematian neonatal ditekan guna mencapai target tersebut.

Tujuan keempat adalah menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua. Pada target 4B, dinyatakan bahwa memastikan bahwa semua naka perempuan dan anak laki-laki memiliki akses ke pengembangan aak usia dini yang setara, perawatan dan pendidikan anak usia dini sehingga mereka siap untuk pendidikan dasar. Pada target ini, diharapkan angka kelulusan baik SD, SMP, maupun SMA ditingkatkan. Secara

langsung, ketika target ini dicapai maka angka rata-rata lama sekolah yang merupakan salah satu indikator penghitungan IPM akan ikut meningkat. Sedangkan tujuan kedelapan yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua. Dalam tujuan kedelapan, terdapat target 8A yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) minimal 7 persen per tahun di negara-negara berkembang. Salah satu indikator dari target ini adalah meningkatkan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Dengan meningkatnya PNB per kapita, secara tidak langsung akan menaikkan pengeluaran per kapita. Melalui SDGs, tujuan dan target pembangunan manusia terus diupayakan peningkatannya. Pada akhirnya, dapat disimpulkan pembangunan manusia dapat tercapai melalui pencapaian target SDGs.

B. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Carl Friedrich dalam Wahab (2015:9) mendefinisikan kebijakan (*policy*) sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Sementara itu, Amara Raksataya dalam Ali (2006:5-6) mengemukakan kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu suatu kebijakan memuat tiga elemen yaitu pertama, identifikasi dari tujuan yang ingin

dicapai. Kedua, taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan ketiga, penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Sedangkan kebijakan publik menurut pakar Prancis, Lemieux dalam Wahab (2015:15) mendefinisikan kebijakan publik sebagai produk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah publik yang terjadi di lingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur. Keseluruhan proses aktivitas itu berlangsung sepanjang waktu. Lebih lanjut Parson dalam Fermana (2009:34) kebijakan publik juga merupakan studi bagaimana, mengapa, dan apa efek dari tindakan aktif (*action*) dan pasif (*inaction*) pemerintah atau kebijakan publik adalah studi tentang apa yang dilakukan pemerintah, mengapa pemerintah mengambil tindakan tersebut, dan apa akibat dari tindakan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan yang dirumuskan oleh aktor-aktor politik sebagai sarana memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat. Dengan adanya kebijakan publik dapat diketahui mengenai cara bagaimana mengatasi sebab akibat dari permasalahan tersebut.

2 Implementasi Kebijakan Publik

Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Menurut Mazmanian dan Sabaiter dalam Agustino (2015:128) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan biasanya dalam bentuk undang-undang, tapi dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau pun keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya. Sedangkan menurut Agustino (2016:126) implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan. Sehingga dapat disimpulkan implementasi kebijakan merupakan tindakan melaksanakan keputusan yang telah dibuat oleh para aktor-aktor politik.

3. Model Implementasi Kebijakan Publik

Model implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh Van Metter & Van Horn yang disebut dengan istilah *a Model of The Policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan dengan berbagai variabel.

Ada enam variabel, menurut Van Metter & Van Horn dalam Agustino (2016:132-135) yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik antara lain:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio kultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di tingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tetapi di luar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan waktu.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasikan kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya.

4. Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implemmentator laksanakan adalah kebijakan dari atas (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi dan begitu pula sebaliknya.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

B. Program

1. Pengertian Program

Agustino (2016:24-26) mendefinisikan program sebagai rancangan mengenai azas usaha (dalam ketenagakerjaan, perekonomian, dan lain sebagainya) yang akan dijalankan. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 1 ayat (16) menjelaskan bahwa “program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah”.

Sejalan dengan penjelasan diatas, menurut Arikunto dan Abdul Jabar (2014:4) program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan maka program merupakan sebuah sistem, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan bukan hanya satu kali tetapi berkesinambungan.

Ada tiga pengertian penting dan perlu ditekankan dalam menentukan program, yaitu:

1. realisasi atau implementasi suatu kebijakan;
2. terjadi dalam waktu relatif lama bukan kegiatan tunggal tetapi jamak berkesinambungan;
3. terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Berkaitan tentang pelaksanaan program pembangunan maka dapat diketahui bahwa disamping bersifat alokatif dan deskriptif, program juga bersifat inivatif dan multi fungsi. Hal ini sesuai dengan definisi yang dikemukakan oleh United Nations (1971) bahwa:

“Program is taken to mean a form of organized social activity with a specific objective, limited in space and time. It often consist of an interrelated group of projects and usually limited to one or more an going organizations and activities.”

Dengan demikian suatu program pembangunan berbagai macam masalah pembangunan dan kemasyarakatan dicoba dipecahkan. Karena demikian banyaknya problem yang muncul dalam masyarakat, maka diperlukan pula program yang banyak. Atas dasar itulah maka di kebanyakan negara sedang berkembang muncul beragam program semisal program KB, peningkatan gizi, wajib belajar, pembangunan desa, penanggulangan perencanaan lingkungan dan lain-lain. Program tersebut di samping bertujuan untuk memecahkan suatu masalah tertentu (*problem solving*) dimaksudkan juga agar masyarakat bangkit motivasinya dan inovasinya, karena mereka tertarik pada program yang dicanangkan. Dalam mencapai tujuan tersebut disadari benar bahwa kelangkaan sumber merupakan hal yang tak dapat dihindari. Oleh karenanya maka para pengelola pembangunan harus mampu menyusun skala prioritas sehingga alokasi dan distribusi sumber daya dapat dilaksanakan secara tepat. Agar fungsi tersebut dapat terlaksana dengan baik maka suatu program harus memiliki ciri-ciri:

1. Tujuan yang dirumuskan secara jelas;
2. Penentuan dari peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan;
3. Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten dan atau proyek-proyek yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan program selektif mungkin;

4. Pengukuran dengan ongkos-ongkos yang diperkirakan dan keuntungan-keuntungan yang diharapkan akan dihasilkan dari program tersebut;
5. Hubungan dengan kegiatan-kegiatan lain dalam usaha pembangunan tidak berdiri sendiri;
6. Berbagai upaya di bidang manajemen termasuk penyediaan tenaga, pembiayaan dan lain-lain untuk melaksanakan program tersebut.
(*United Nations, 1971*) dalam *Zauhar (1993:2)*

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahawa program merupakan bagian dari sebuah implementasi kebijakan publik yang di dalamnya terdapat satu atau lebih program yang dirumuskan dan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan.

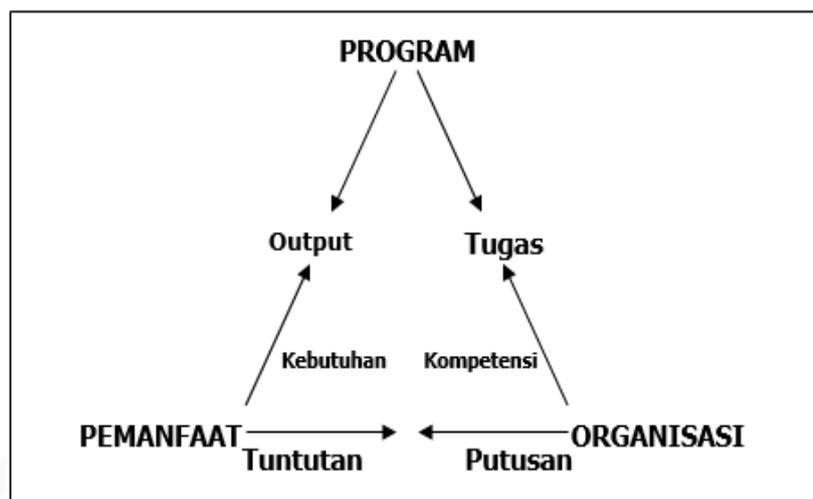
2. Pelaksanaan Program

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pelaksanaan sebagai proses, cara, perbuatan melaksanakan rancangan keputusan dan sebagainya. Menurut Wahab (2015:133) dalam arti seluas-luasnya implementasi juga sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama di antara beragam pemangku kepentingan (*stakeholders*), aktor, organisasi (publik atau privat), prosedur, dan teknik secara sinergitas yang digerakkan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan ke arah tertentu yang dikehendaki.

Salah satu model implementasi program yakni model yang diungkapkan oleh David C. Model ini memakai pendekatan proses pembelajaran model atau yang lebih dikenal dengan model kesesuaian implementasi program. Model ini berintikan kesesuaian antara tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program,

yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program dan kelompok sasaran program.

Model kesesuaian Korten digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Model Kesesuaian Implementasi Program

Sumber: David C. Korten (1988) dalam Haedar Akib dan Antonius Tarigan (2000:12)

Korten menggambarkan model ini berintikan tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran program. Korten dalam Tarigan (2000:12) menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program.

1. Program

Kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat).

2. Organisasi

Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian

antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana.

3. Pemanfaat

Kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program.

Berdasarkan pola yang dikembangkan Korten, dapat dipahami bahwa jika tidak terdapat kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan, kinerja program tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan. Jika output program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran jelas outputnya tidak dapat dimanfaatkan. Jika organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang disyaratkan oleh program maka organisasinya tidak dapat menyampaikan output program dengan tepat. Atau, jika syarat yang ditetapkan organisasi pelaksana program tidak dapat dipenuhi oleh kelompok sasaran maka kelompok sasaran tidak mendapatkan output program. Oleh karena itu, kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan mutlak diperlukan agar program berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Model kesesuaian implementasi kebijakan yang diperkenalkan oleh Korten memperkaya model implementasi kebijakan yang lain. Hal ini dapat dipahami dari kata kunci kesesuaian yang digunakan. Meskipun demikian, elemen yang disesuaikan satu sama lain – program, pemanfaat dan organisasi – juga sudah termasuk baik dalam dimensi isi kebijakan (program) dan dimensi konteks implementasi (organisasi) maupun dalam outcomes (pemanfaat).

Menurut Abdullah dalam Rinasti (2017:29) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan suatu program, adapun hal yang harus diperhatikan mengenai tiga unsur yang penting dan mutlak ada, antara lain:

- a. Adanya program yang ingin dilaksanakan, sehingga adanya suatu tujuan dan hasil yang ingin dicapai dalam suatu program tersebut.
- b. Target group, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut dalam bentuk perubahan dan peningkatan, sehingga dari pelaksanaan program tersebut diharuskan memberi hasil positif bagi sekelompok masyarakat yang telah menjadi target.
- c. Unsur pelaksana baik organisasi atau perorangan yang bertanggungjawab atas pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

3. Evaluasi Program

Istilah evaluasi mempunyai arti berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Menurut Wirawan dalam Munthe (2015:7) mengatakan bahwa evaluasi sebagai riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi.

Menurut Sudjana dalam Hanggara (2017:34) evaluasi program sering disalahartikan dan dianggap sebagai kegiatan untuk mencari kesalahan atau kelemahan program, seseorang atau kelompok pelaksana program. Evaluasi program bukanlah kegiatan untuk menetapkan baik dan buruknya suatu program tetapi meminimalisir dampak negatif ataupun kekurangan suatu program untuk tujuan perbaikan dimasa mendatang. Sementara itu evaluasi program menurut Blaine R. Worten dan James R. Sanders dalam Munthe (2015:5) mengatakan evaluasi program merupakan proses deskripsi, pengumpulan data dan penyampaian informasi kepada pengambil keputusan yang akan di pakai untuk pertimbangan apakah program perlu diperbaiki, diberhentikan atau diteruskan.

Menurut Arikunto dan Abdul Jabar dalam Tulung (2014:4) ada empat kemungkinan kebijakan yang dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program yaitu:

1. Menghentikan program

Menghentikan program karena dipandang bahwa program tersebut tidak ada manfaatnya, atau tidak dapat terlaksana sebagaimana diharapkan.

2. Merevisi program,

Merevisi program karena ada bagian-bagian yang kurang sesuai dnegan harapan (terdapat kesalahan tetapi tidak sedikit).

3. Melanjutkan program

Melanjutkan program karena pelaksanaan program menunjukkan bahwa segala sesuatu sudah berjalan sesuai dengan harapan dan memberikan hasil yang bermanfaat.

4. Menyebarkan program

Menyebarkan program yakni melaksanakan program ditempat lain atau mengulangi lagi program di lain waktu, karena program tersebut berhasil dengan baik, maka sangat baik jika dilaksanakan lagi di tempat dan waktu lain.

C. Kampung KB

1. Pengertian Kampung KB

Menurut Petunjuk Teknis Kampung KB BKKBN (2015:3) Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara, yang memiliki kriteria tertentu, dimana terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis. Kampung KB direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi oleh dan untuk masyarakat. Pemerintah, pemerintah daerah, lembaga non pemerintah dan swasta berperan dalam fasilitasi, pendampingan dan pembinaan.

2. Tujuan Umum

Menurut Petunjuk Teknis Kampung KB BKKBN (2015:4) tujuan umum Kampung KB yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

3. Tujuan Khusus

Menurut Petunjuk Teknis Kampung KB BKKBN (2015:4) tujuan khusus Kampung KB antara lain:

- a. Meningkatkan peran pemerintah, pemerintah daerah, lembaga non pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, pendampingan dan pembinaan masyarakat untuk menyelenggarakan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait;
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan;
- c. Meningkatkan jumlah peserta KB aktif modern;
- d. Meningkatkan ketahanan keluarga melalui program Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja;
- e. Meningkatkan pemberdayaan keluarga melalui Kelompok UPPKS;
- f. Menurunkan angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- g. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- h. Meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk usia sekolah;
- i. Meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan kampung;
- j. Meningkatkan sanitasi dan lingkungan kampung yang sehat dan bersih;
- k. Meningkatkan kualitas keimanan para remaja/mahasiswa dalam kegiatan keagamaan (pesantren, kelompok ibadah/kelompok doa/ceramah keagamaan) di kelompok PIK KRR/remaja;

1. Meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air para remaja/mahasiswa dalam kegiatan sosial budaya (festival seni dan budaya, dan lain-lain) di kelompok PIK KRR/mahasiswa dan seterusnya.

4. Prsyarat Wajib Pembentukan Kampung KB

Berdasarkan Petunjuk Teknis Kampung KB BKKBN (2015:5) dalam proses pembentukannya, suatu wilayah yang akan dijadikan sebagai lokasi Kampung KB perlu memperhatikan persyaratan wajib yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Tersedianya Data Kependudukan yang Akurat

Data Kependudukan yang akurat adalah data yang bersumber dari hasil pendataan keluarga, data potensi desa dan data catatan sipil yang akurat sehingga dapat digunakan sebagai dasar penetapan prioritas, sasaran dan program yang akan dilaksanakan di suatu wilayah Kampung KB secara berkesinambungan.

- b. Dukungan dan komitmen Pemerintah daerah

Komitmen dan peranan aktif seluruh instansi/unit kerja pemerintah khususnya Perintahan Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam memberikan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di kampung KB dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugas instansi masing masing untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

- c. Partisipasi Masyarakat yang berpartisipasi aktif

Partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaan seluruh kegiatan yang akan dilakukan di kampung KB secara berkesinambungan guna meningkatkan taraf hidup seluruh masyarakat yang di wilayahnya.

5. Ruang lingkup kegiatan Kampung KB

Berdasarkan Petunjuk Teknis Kampung KB BKKBN (2015:6) ruang lingkup pelaksanaan kegiatan di Kampung KB meliputi:

- a. Kependudukan;
- b. Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
- c. Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga (Pembangunan Keluarga);
- d. Kegiatan Lintas Sektor (Bidang Pemukiman, Sosial Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan sebagainya disesuaikan dengan kebutuhan wilayah Kampung KB).

6. Sasaran Kampung KB

Menurut Petunjuk Teknis Kampung KB BKKBN (2015:7) sasaran Kampung KB antara lain:

- a. Sasaran:

Sasaran yang merupakan subjek dan objek dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kampung KB adalah :

- a) Keluarga
- b) Remaja
- c) Penduduk Lanjut Usia (Lansia)
- d) Pasangan Usia Subur (PUS)

- e) Keluarga dengan balita
 - f) Keluarga dengan remaja
 - g) Keluarga dengan lansia
 - h) Sasaran sektor sesuai dengan bidang tugas masing masing
- b. Pelaksana:
- a) Kepala Desa/Lurah
 - b) Ketua RW
 - c) Ketua RT
 - d) PKB/PLKB/TPD
 - e) Petugas Lapangan sektor terkait
 - f) Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Desa/Kelurahan
 - g) Institusi Masyarakat Pedesaan (PPKBD dan Sub PPKBD)
 - h) Tokoh Masyarakat (Tokoh Adat/Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat di desa/kelurahan)
 - i) Kader

7. Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB

Menurut Petunjuk Teknis Kampung KB BKKBN (2015:10) Kampung KB dibentuk pada tingkatan wilayah Desa/Kelurahan atau Dusun/Rukun Warga (RW) yang memenuhi kriteria-kriteria pemilihan wilayah dan dalam pelaksanaan program dan kegiatannya dikelola oleh Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB yang terdiri atas:

- a. Pelindung : Bupati/Walikota
- b. Penasehat : Kepala SKPD-KB kabupaten/kota

- c. Pembina : Camat
- d. Ketua : Kepala Desa/Lurah
- e. Sekretaris : PKB/PLKB
- f. Bendahara : Ketua PKK Tingkat Desa/Kelurahan
- g. Pelaksana Operasional : PKB/PLKB, Kader, PPKBD/Sub PPKBD, Pos KB

Kelompok Kegiatan (Poktan) dalam Kampung KB terdiri dari:

- a. Forum Musyawarah terdiri dari BPD, LPMD, Toma, Toga, Todat, dll.
- b. Petugas Lini Lapangan terdiri dari PLKB, BIDAN, TP PKK, PPL, dan Petugas Lapangan Instansi terkait.
- c. Poktan Kader-Kader per Bidang sesuai kebutuhan program dan kegiatan pada wilayah Kampung KB (misal: Poktan Kader KKBPK, Poktan Kader Bidang Kesehatan, dst).



Gambar 3. Struktur Organisasi Kampung KB

Sumber: Petunjuk Teknis Kampung KB BKKBN 2015

8. Perencanaan Program dan Kegiatan Kampung KB

Menurut Petunjuk Teknis Kampung KB BKKBN (2015:15) Perencanaan Program dan Kegiatan dikoordinasikan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi dengan melibatkan seluruh unsur di dalam Struktur Organisasi Kampung KB (sesuai SK Bupati/Walikota) melalui Forum Musyawarah atau *inserting* dalam forum-forum lain yang sesuai.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses perencanaan Program dan Kegiatan Kampung KB adalah:

- a) Substansi Program dan Kegiatan yang direncanakan terlebih dahulu dikaitkan dengan Sasaran Strategis Renstra BKKBN 2015-2019, diutamakan untuk merencanakan kegiatan yang memiliki daya ungkit terhadap upaya pencapaian target/sasaran Program KKBPK.
- b) Petugas Lapangan (PKB/PLKB) menyiapkan data dan informasi tentang isu strategis, permasalahan dan kebutuhan baik Program KKBPK maupun lintas sektor untuk diajukan dalam perencanaan Program dan Kegiatan Kampung KB.
- c) Rencana pengembangan/keterpaduan kegiatan lintas sektor/bidang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah dan disusun berdasarkan hasil evaluasi data dan informasi wilayah yang tersedia.
- d) Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan output yang diharapkan serta dikelompokkan berdasarkan Kelompok Kegiatan (Poktan) Kader per-Bidang.

- e) Rencana program dan kegiatan melalui proses *cascading* untuk melihat keterkaitan dengan indikator-indikator keberhasilan Kampung KB yang telah ditetapkan.
- f) Penyusunan Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK/TOR).
- g) Telaah kebutuhan dan pemetaan alur pengalokasian anggaran kegiatan, dibiayai oleh APBN Perwakilan BKKBN Provinsi, APBD SKPD KB, Alokasi Dana Desa, atau lintas sektor terkait.

Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Kampung KB direkap oleh Perwakilan BKKBN Provinsi untuk dilaporkan kepada Kepala BKKBN dengan ditembuskan kepada Direktorat Bina Lini Lapangan dan Biro Perencanaan BKKBN.

9. Tahapan Operasional/Pelaksanaan Kegiatan Kampung KB

Menurut Petunjuk Teknis Kampung KB BKKBN (2015:160) Setelah seluruh proses tahapan pembentukan Kampung KB diatas selesai, maka dilanjutkan pada tahapan implementasi kegiatan yang didahului dengan rapat persiapan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait di tingkat kabupaten, dimana salah satu output yang diharapkan dapat dicapai pada rapat tersebut adalah tersusunnya terjemahan Rencana Program dan Anggaran Kampung KB melalui Alokasi Jadwal Kegiatan (AJK) yang meliputi rencana pelaksanaan kegiatan bulanan dan mingguan agar dapat mengarahkan para pelaksana kegiatan (Kelompok Kerja Kader per-Bidang) agar dapat mencapai target kinerja yang diharapkan. Kemudian pada

tahapan selanjutnya, diselenggarakan workshop tingkat Kabupaten/Kota oleh Perwakilan BKKBN Provinsi, dimana workshop tersebut bertujuan untuk:

- a. Memberikan pemahaman tentang konsep Kampung KB termasuk indikator-indikator keberhasilan yang harus dicapai.
- b. Mensosialisasikan Rencana Program dan Kegiatan Kampung KB yang telah disusun.
- c. Mensosialisasikan Alokasi Jadwal Kegiatan (AJK) bulanan dan mingguan.
- d. Pemaparan informasi tentang alur penganggaran kegiatan (APBN/APBD/Dana Desa/Dukungan anggaran lintas sektor).
- e. Mensosialisasikan format-format evaluasi dan pelaporan.
- f. Koordinasi lintas sektor dan kemitraan.

Di tingkat Kecamatan, diselenggarakan lokakarya mini yang diikuti oleh pemangku kepentingan tingkat Kecamatan dan Desa/Lokasi Kampung KB untuk kemudian ditindaklanjuti dengan lokakarya mini tingkat Desa dan Pelatihan Kader Desa/Kelurahan (Kelompok Kerja Kader per-bidang yang telah ditetapkan dalam Struktur Organisasi Kampung KB) dengan target setiap kader mampu melaksanakan kegiatan Kampung KB yang telah direncanakan. Kader bersama toga/toma melaksanakan KIE kepada masyarakat melalui:

- a) KIE Individu atau kunjungan ke rumah-rumah sasaran;
- b) KIE Kelompok dengan memanfaatkan forum-forum sosial (pengajian, pertemuan BKB, Pertemuan BKR, pertemuan UPPKS, Arisan, Taman Posyandu dll);

- c) KIE Massa dengan memanfaatkan media tradisional, Mupen, Acara-acara hiburan rakyat, dll;
- d) KIE Konseling kepada sasaran (Ibu Hamil,BUTEKI,PUS bukan peserta KB, Calon Peserta KB) untuk menentukan dan memantapkan pilihan kontrasepsi yang digunakan



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Djamal (2015:5) penelitian merupakan kegiatan (penyelidikan) ilmiah yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode atau pendekatan tertentu dalam rangka memecahkan suatu masalah sehingga diperoleh kebenaran atau dalil dan bahkan suatu teori baru. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan suatu keadaan secara luas, mendalam, dan menyeluruh. Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan deskripsi secara faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat, dan hubungan antar fenomena yang diselidiki sesuai dengan yang diteliti.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengetahui dan memahami data lebih dalam. Menurut Moleong (2014:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Jadi penelitian ini dipilih karena dapat mempermudah peneliti dalam mendeskripsikan, menganalisis dan menyajikan data. Dengan penelitian deskriptif, hasil penelitian berupa wawancara dan observasi terkait pelaksanaan program Kampung Keluarga sebagai upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas di Kota

Mojokerto dapat disajikan dalam rangkaian paragraf. Sehingga peneliti dapat menggambarkan secara rinci dan mengambil kesimpulan mengenai topik penelitian.

B. Fokus Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut fokus. Penentuan fokus penelitian bertujuan untuk menentukan objek perhatian menjadi terpusat dan membatasi objek tujuan untuk diteliti. Menurut Moeleong (2014:94) penetapan fokus penelitian memiliki 2 (dua) maksud atau tujuan, yaitu:

1. Membatasi studi, dalam hal ini fokus akan membatasi bidang ikuri. Misalnya jika kita membatasi diri pada upaya menemukan teori dari dasar, maka lapangan penelitian lainnya tidak akan kita manfaatkan lagi.
2. Memenuhi kriteria masuk-keluar suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan, dengan bimbingan dan arahan suatu fokus, seorang peneliti tahu persis data mana dan data tentang apa yang perlu dikumpulkan dan data mana pula, yang walau pun menarik, karena tidak relevan, tidak perlu dimasukkan ke dalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan.

Jadi dengan penetapan fokus yang jelas, akan mempermudah dalam pembuatan keputusan yang tepat tentang data mana yang diperlukan dan tidak diperlukan. Sesuai dengan penjelasan di atas ,maka fokus dari penelitian ini adalah:

1. Pelaksanaan Program Keluarga Berencana sebagai upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas di Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, yang mencakup:
 - a. Kegiatan Kampung KB
 - b. Penganggaran kegiatan

- c. Evaluasi
 - d. Koordinasi lintas sektor dan kemitraan.
2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Keluarga Berencana sebagai upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas di Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto
- a. Faktor Pendukung
 - 1) Adanya dukungan dari tokoh masyarakat dan partisipasi masyarakat di Lingkungan Kampung KB
 - 2) Komunikasi
 - b. Faktor Penghambat
 - 1) Kurangnya dana kegiatan
 - 2) Faktor usia kader-kader kelompok kegiatan

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan suatu lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih adalah Kota Mojokerto. Sedangkan situs penelitian merupakan tempat untuk memperoleh data dan informasi yang digunakan untuk menjawab permasalahan sesuai dengan fokus penelitian yang diteliti. Sehingga situs penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah di Kampung Keluarga Berencana tepatnya di Lingkungan Randengan Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan bagian yang penting dalam sebuah penelitian. Menurut Djamal (2015:64) sumber data adalah semua fakta dimana data bisa diperoleh. Sedangkan menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2014:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Data-data tersebut digali dari sumber-sumber yang berkaitan atau terlibat dalam masalah yang diteliti. Sumber data penelitian dapat dibedakan menjadi dua jenis, menurut Sugiyono (2013:225) sumber data dapat diklarifikasi sebagai berikut:

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2013:225) sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini, data primer kualitatif diperoleh dengan wawancara (interview) dari informan di lapangan dan pengamatan (observasi) secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dari informan yang dijadikan sampel, dalam penelitian ini yaitu Kepala Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto, Pegawai bagian koordinator lapangan keluarga berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto, Pembina Kampung KB Lingkungan Randegan RW 1 dan Kader KB Lingkungan Randegan RW 1 Kelurahan Kedundung.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yang dapat memperkuat atau mendukung data primer, yang bersumber dari dokumen-dokumen, paper-paper atau browsing di internet yang berkaitan dengan tema penelitian. Data sekunder yang dibutuhkan peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Buku Petunjuk teknis program Kampung KB.
- b. Dokumen formal atau non formal yang terkait pelaksanaan program Kampung KB di Lingkungan Randegan Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto
- c. Arsip-arsip atau laporan yang ada terkait pelaksanaan program Kampung KB di Lingkungan Randegan Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto.
- d. Buku refrensi, jurnal, arikel, maupun situs resmi yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian lapangan dengan terjun langsung ke obyek yang dijadikan sasaran penelitian. Menurut Moleong (2014:26) penelitian lapangan (*field research*) dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk

mengumpulkan data kualitatif. Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Nasution dalam Sugiyono (2014:226) observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (*proton dan electron*) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasi dengan jelas. Observasi langsung diperoleh peneliti dari pengamatan di Kampung KB Lingkungan Randengan Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto.

2. Wawancara

Menurut Gunawan (2013:162) wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara (*interview*) dan yang diwawancarai (*interviewed*) tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap dan pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti berhadapan langsung dengan narasumber untuk mendapatkan informasi langsung yang dibutuhkan. Informasi yang diperoleh peneliti adalah dari tanya jawab dengan berbagai informan yakni:

- a. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, yaitu Pak Djunaidi.
- b. Koordinator Lapangan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, yaitu Ibu Asminarti.
- c. Pembina Kampung KB sekaligus ketua LPM yaitu, Pak Matali
- d. Ketua Kader KB Kelurahan Kedundung yaitu, Bu Fatimah
- e. Kader KB Kelurahan Kedundung yaitu, Bu Fatimah, Bu Arifah, Bu Choirun Nisak

3. Dokumentasi

Menurut Gottschalk dalam Gunawan (2013:175) dokumen seringkali digunakan para ahli dalam dua pengertian, pertama, berarti sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan daripada kesaksian lisan, artefak, peninggalan-peninggalan terlukis, dan petilasan-petilasan arkeologis. Pengertian kedua, diperuntukan bagi surat-surat resmi dan surat-surat negara, seperti surat perjanjian, undang-undang, hibah, konsesi dan lainnya. Pada penelitian ini peneliti mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang ada di Kampung KB Lingkungan Randengan Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto maupun saat wawancara dengan pihak-pihak terkait.

F. Instrumen Penelitian

Sugiyono (2014:222) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data dan informasi, yaitu:

1. Peneliti Sendiri

Peneliti kualitatif merupakan instrumen penting dalam penelitian. Menurut Moleong (2014:168) menyatakan bahwa “kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit. Ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya”. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa peneliti sendiri menjadi instrument penelitian karena peneliti berperan sebagai pengumpul data.

2. Pedoman wawancara

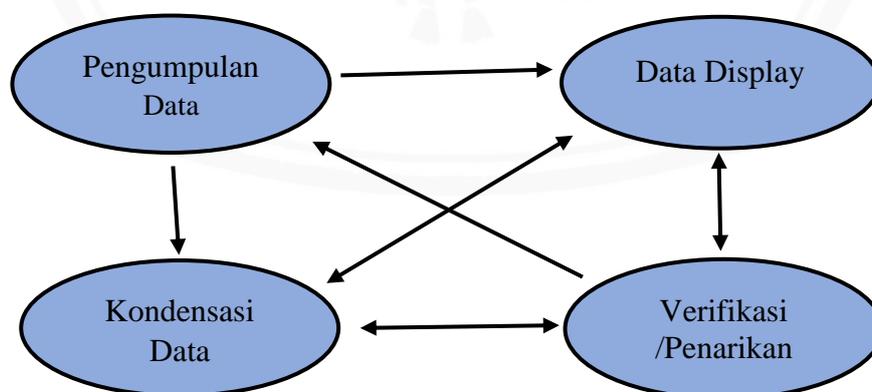
Pedoman wawancara adalah serangkaian pertanyaan yang ditanyakan kepada informan peneliti. Pedoman wawancara terdiri dari beberapa pertanyaan yang terkait dengan fokus penelitian untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah.

3. Perangkat penunjang

Merupakan alat yang diperlukan peneliti untuk mencatat apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikir dalam mengumpulkan data di lapangan. Alat ini berupa buku catatan, alat tulis, kamera, dan alat perekam.

G. Analisis Data

Sugiyono (2014:244) mendefinisikan analisis data sebagai proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data interaktif oleh Miles, Huberman dan Saldana. Miles, Huberman dan Saldana (2014:8) mengemukakan bahwa ada tiga bentuk analisis yaitu *data condensation*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Ketiga aktivitas analisis tersebut ditunjukkan pada gambar dibawah ini.



Gambar 4. Komponen Analisis Data Model Interaktif

Sumber: Miles, Huberman dan Saldana (2014:8)

a) *Data Condensation* (Kondensasi Data)

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya.

b) *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman.

c) *Conclusion Drawing/Verification* (Pengarikan Kesimpulan/Verifikasi)

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan “final” mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan-tuntutan pemberi dan tuntutan-tuntutan pemberi dana.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Mojokerto

a. Kondisi Geografis Kota Mojokerto

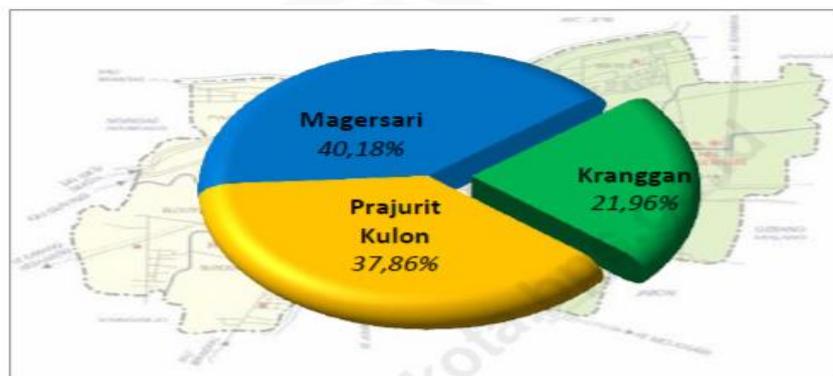
Kota Mojokerto terletak di tengah-tengah Kabupaten Mojokerto, terbentang pada $7^{\circ} 33'$ Lintang Selatan dan $112^{\circ} 28'$ Bujur Timur. Wilayahnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 22 m di atas permukaan laut dengan kondisi permukaan tanah yang agak miring ke timur dan utara antara 0-3%. Batas daerah, disebelah utara berbatasan dengan Sungai Brantas, yang membentang memisahkan wilayah kota dengan kabupaten. Disebelah timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto. Sedangkan di sebelah barat dan selatan berbatasan dengan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.



Gambar 5. Peta Wilayah Kota Mojokerto

Sumber : Google Maps, 2018

Secara umum, wilayah Kota Mojokerto dapat dibagi menjadi 3 Kecamatan. Kecamatan Prajurit Kulon di sebelah Timur, Kecamatan Kranggan di tengah wilayah dan Kecamatan Magersari di sebelah barat. Kota Mojokerto terdiri 18 Kelurahan, 666 Rukun Tetangga (RT) dan 175 Rukun Warga (RW). Dapat dilihat perbandingan luas wilayah menurut kecamatan pada gambar di bawah ini.



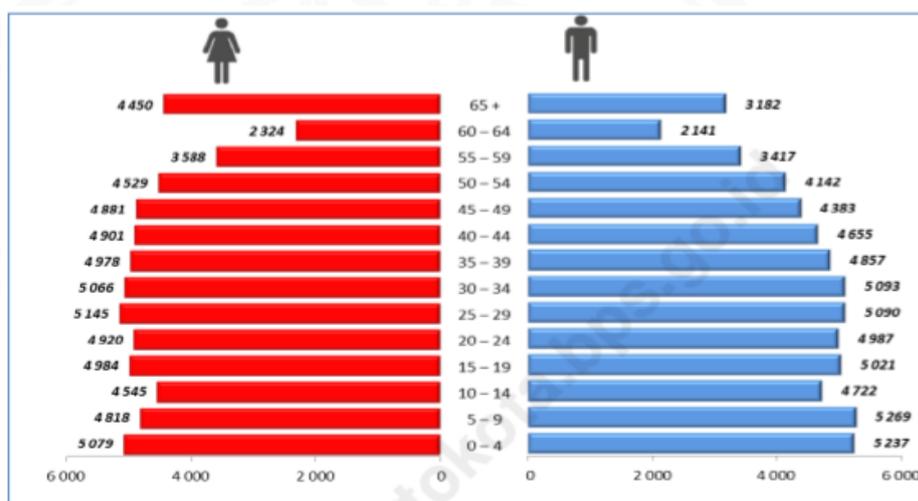
Gambar 6. Perbandingan Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kota Mojokerto (Km²) Tahun 2016

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto Dalam Angka Tahun 2017

b. Kondisi Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Besarnya jumlah penduduk di Kota Mojokerto dengan luas wilayah yang sangat kecil akan menyebabkan kepadatan Kota Mojokerto menjadi sangat tinggi, yaitu 8.511 penduduk per kilometer persegi (km²) di tahun 2016. Penduduk Kota Mojokerto tahun 2016 berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia 2010-2035 adalah 126.404 jiwa yang terdiri 62.196 jiwa penduduk laki-laki dan 64.208 jiwa penduduk perempuan. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2016 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 0,97. Sedangkan berdasarkan hasil dari registrasi penduduk akhir tahun 2016, Kota Mojokerto mempunyai penduduk sebanyak 140.161 jiwa yang tersebar di 3 kecamatan dan 18

kelurahan. Penduduk laki-laki sebanyak 69.487 jiwa atau sebesar 49,58 persen dan penduduk yang berjenis kelamin perempuan adalah sebanyak 70.674 atau sebesar 50,42 persen. Dari komposisi penduduk laki-laki dan perempuan itu bisa dilihat bahwa Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*) Kota Mojokerto adalah sebesar 98,32 persen, artinya di setiap 100 penduduk wanita terdapat 98 penduduk laki-laki. Rincian komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur disajikan pada gambar berikut:



Gambar 7. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Di Kota Mojokerto Tahun 2016

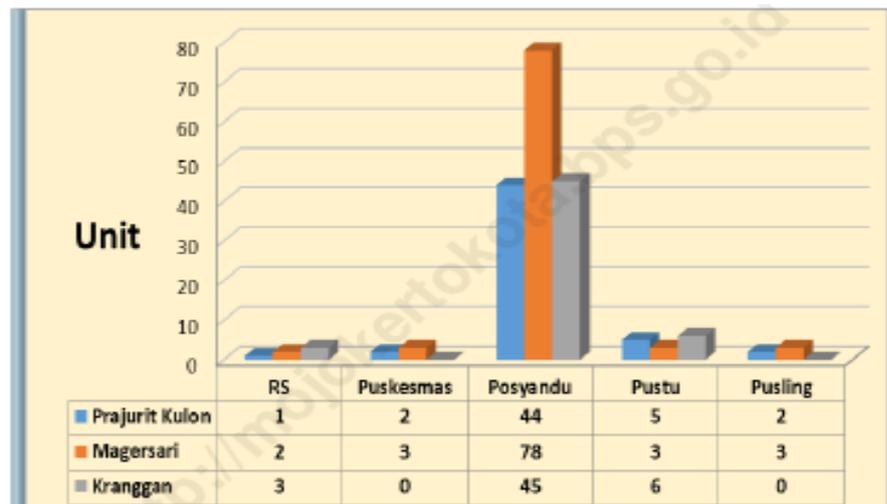
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto Dalam Angka Tahun 2017

Jumlah pencari kerja terdaftar di Kota Mojokerto pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mojokerto pada Tahun 2016 sebesar 559 pekerja, dengan rincian pencari kerja laki-laki sebanyak 275 orang dan pencari kerja perempuan sebanyak 284 orang. Pencari kerja di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto pada tahun 2016 terbanyak dengan pendidikan SMK sebanyak 187 orang sedangkan untuk pendidikan terendah SMU sebanyak 161 orang, akademi

sebanyak 11 orang dan universitas 35 orang. Sementara itu menurut sektor lapangan usaha, sektor perdagangan, hotel, dan restoran merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja usia 15 tahun keatas sebanyak 23.527 pekerja diikuti sektor industri pengolahan sebanyak 18.337 pekerja dan jasa kemasyarakatan sosial dan perseorangan sebesar 11.734 pekerja.

c. Kondisi Pendidikan dan Kesehatan

Tahun 2016 penduduk Kota Mojokerto usia 7- 12 tahun 100% masih bersekolah. Jumlah penduduk yang bersekolah pada tahun 2016 sekolah dasar sebesar 17.376 murid, sekolah lanjutan tingkat pertama/ sederajat sebesar 2. 955 murid dan murid sekolah menengah umum/ sederajat sebesar 9.034 murid. Dari hasil SUSENAS Maret 2016, presentase partisipasi sekolah dari penduduk usia 7- 12 tahun 100,00%; 13-18 tahun 97,19%; 16-21 tahun 89,27% dan usia 19-24 tahun 37,50%. Sedangkan sarana kesehatan di Kota Mojokerto meliputi rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, apotik, dan posyandu. Pada tahun 2016 jumlah kasus penyakit di Kota Mojokerto sebanyak 90. 484 kasus. Jumlah rumah sakit yang ada di Kota Mojokerto tahun 2016 adalah sebanyak 6 rumah sakit umum milik pemerintah maupun swasta, 5 puskesmas dan 14 puskesmas pembantu serta 5 puskesmas keliling dan 167 posyandu. Rincian jumlah fasilitas kesehatan di Kota Mojokerto disajikan pada gambar berikut:



Gambar 8. Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Kota Mojokerto Tahun 2016

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto dalam Angka Tahun 2017

2. Gambaran Umum Kecamatan Magersari

a. Visi Misi Kecamatan Magersari

Visi Kecamatan Magersari lima tahun ke depan merupakan perwujudan dari visi yang telah disepakati oleh Kecamatan Magersari dan diharapkan bisa berintegrasi untuk menunjang tercapainya Visi Pemerintah Kota Mojokerto 2014-2019. Visi Kecamatan Magersari yaitu: *“Mewujudkan kecamatan magersari sebagai pembantu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pelayanan masyarakat yang berkualitas”*. Sedangkan Misi Kecamatan Magersari yaitu:

Misi 1: Memperkuat fungsi pembantuan penyelenggaraan pemerintahan dengan mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan profesionalisme aparatur demi tercapainya pelayanan berkualitas.

Misi 2: Mendorong terwujudnya peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah melalui system perencanaan yang aspiratif, aplikatif dan akuntabel.

Misi 3: Mendorong terwujudnya kesejahteraan social masyarakat melalui pembinaan bidang Pendidikan, keagamaan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, peranan wanita, kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.

Misi 4: Menciptakan lingkungan yang tertib, aman, nyaman dan tentram.

b. Kondisi Geografis

Kecamatan Magersari adalah salah satu kecamatan dari 3 Kecamatan yang ada di Kota Mojokerto. Dipandang dari segi wilayah, Kecamatan Magersari memiliki luas wilayah sekitar 659 Ha. Adapaun batas wilayah sebelah utara berbatasan Kota Mojokerto terletak di tengah-tengah Kabupaten Mojokerto, terbentang pada 7,31' Lintang selatan dan 112° 28', bujur timur dengan kondisi permukaan tanah agak miring ke timur ke utara 0-3% serta dengan ketinggian rata-rata ±22 m diatas permukaan laut. Adapun batas wilayah Kecamatan Magersari secara administratif adalah:

- a. Sebelah utara : Sungai Brantas yang membentang memisahkan wilayah Kota dengan Kabupaten Mojokerto.
- b. Sebelah selatan : berbatasan dengan Kecamatan Puri (Desa Kenanten)
- c. Sebelah barat : Kecamatan Prajuritkulon (Kelurahan Meri dan Kelurahan Kauman)
- d. Sebelah timur : Kecamatan Mojoanyar (Desa Lengkong, Desa Kepuh Anyar dan Desa Gebang Malang)

c. Kondisi Demografis

Kecamatan Magersari memiliki luas wilayah sebesar 8,705 Km² dihuni sebanyak 75.144 jiwa yang terdiri dari 20.773 KK dan memiliki tingkat kepadatan secara total 8.632,28 jiwa/km². Jika diperhatikan, persebaran penduduk di setiap kecamatan terlihat bahwa Kelurahan Jagalan dengan luas wilayah 0,166 km² merupakan wilayah Kelurahan dengan jumlah penduduk terpadat, yaitu dengan kepadatan 20.156,63 jiwa/ km², diikuti oleh Kelurahan Magersari dengan luas wilayah 0,329 km² memiliki kepadatan penduduk sebesar Kelurahan Gunung Gedangan dengan luas wilayah 1,705 km² yaitu dengan kepadatan penduduk hanya sebesar 4.111,44 jiwa/km², hal ini mengingat di wilayah Gunung Gedangan sebagian wilayahnya terdapat area persawahan dan lahan terbuka. Tingkat kepadatan penduduk Kecamatan Magersari dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 1. Tingkat Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km²) Tahun 2014

No	Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Tingkat Kepadatan (Jiwa/Km ²)
1	Meri	1,648	8.448	5.126,21
2	Gunung Gedangan	1,705	7.010	4.111,44
3	Kedundung	2,286	15.094	6.602,80
4	Balongsari	0,829	7.876	9.500,60
5	Jagalan	0,166	3.346	20.156,63
6	Sentanan	0,139	2.514	18.086,33
7	Purwotengah	0,135	1.733	12.837,04
8	Gedongan	0,147	2.400	16.326,53
9	Magersari	0,329	5.997	16.326
10	Wates	1,321	20.726	18.227,96
	Jumlah	8.705	75.144	8.632,28

Sumber: Kecmagersari.mojokertokota.go.id, 2018

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Kecil Berkualitas

Program Kampung KB disosialisasikan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mulai tahun 2015 sedangkan pelaksanaan pembentukan dan pencanangannya dimulai tahun 2016 diseluruh wilayah Kabupaten/ Kota di Indonesia. Kampung KB merupakan salah satu bentuk/model miniatur pelaksanaan program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) secara utuh yang melibatkan seluruh bidang di lingkungan BKKBN dan bersinergi dengan Kementerian/Lembaga, mitra kerja, stakeholders, instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah, serta dilaksanakan di tingkatan pemerintahan terendah di seluruh Kabupaten dan Kota (Buku Petunjuk Teknis Kampung KB 2015). Di Kota Mojokerto salah satu Kampung KB berada di Lingkungan Randegan RW 1 Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto. Kampung KB Lingkungan Randegan ini sudah terbentuk dan diresmikan langsung oleh Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty pada tanggal 28 Maret 2016.

Kampung KB Lingkungan Randegan Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto mempunyai tujuan umum yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat, peran pemerintah, lembaga non pemerintah serta swasta dalam melaksanakan program KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga) sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah. Sedangkan tujuan khusus Kampung KB Lingkungan Randegan yakni:

- 1) Meningkatkan komitmen mitra dan stakeholder;
- 2) Meningkatkan peran serta masyarakat;
- 3) Meningkatkan KIE program KKBPK kepada sasaran dan masyarakat;
- 4) Meningkatkan mekop di tingkat lini lapangan;
- 5) Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan terintegrasinya program;
- 6) Meningkatkan kualitas data dan informasi keluarga;
- 7) Meningkatkan cakupan program KKBPK

a. Kegiatan di Kampung KB

Program Kampung KB menjadi *icon* penting BKKBN. Program ini merupakan salah satu program inovasi yang dicanangkan dan diinstruksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo sebagai upaya dalam memperkuat program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat terutama di wilayah pinggiran, wilayah miskin, padat penduduk, dan terpencil. Sehingga dengan adanya Kampung KB dapat menjangkau program KB di seluruh wilayah di Indonesia. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Djunaidi selaku Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB Dinas P3AKB Kota Mojokerto, yang mengatakan bahwa:

“Program Kampung KB adalah sebagai implementasi / pelaksanaan Undang – Undang 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga bahwa dalam pelaksanaan program Kependudukan dan KB kewenangan BKKBN tidak hanya terbatas pada masalah pembangunan Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS) saja namun juga menyangkut masalah Pengendalian Penduduk. Selain itu juga sebagai upaya untuk memperluas cakupan / jangkauan pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga (KKBPK) diseluruh tingkatan wilayah melalui realisasi pelaksanaan kegiatan program KKBPK secara utuh dan terintegrasi bahkan lintas sektor di lini lapangan. Hal ini perlu dilakukan mengingat penanganan pelaksanaan program KB ini mengalami pasang surut, ketika pada masa-masa puncaknya pernah dipakai

rujukan berbagai Negara lain untuk belajar masalah pelaksanaan program KB ini, namun pada masa-masa setelah reformasi perhatian yang tercurah mengalami penurunan yang cukup drastis yang membawa akibat, semakin melemahnya implementasi pelaksanaan program KB di Indonesia sehingga laju pertumbuhan penduduk pada masa tersebut mengalami stagnasi dan fluktuatif. Oleh karena itu perlu ada upaya-upaya strategis yang berupa inovasi yang dapat dipakai sebagai mercusuar baru dalam mendongkrak, meningkatkan dan menguatkan pelaksanaan program KKBPK melalui pembentukan Kampung KB. (Wawancara pada tanggal 9 Maret pukul 14.30 di Dinas P3AKB Kota Mojokerto)

Dasar hukum pembentukan Kampung KB ini adalah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/70/SJ tentang Pencanangan dan Pembentukan Kampung KB. Sementara itu Kampung KB di Lingkungan Randegan RW 1 Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto dibentuk pada tahun 2016 dan diresmikan pada bulan Maret 2016. Dalam pelaksanaan program Kampung KB terdapat kegiatan-kegiatan untuk mensukseskan Kampung KB. Kegiatan itu merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri atas sekumpulan tindakan. Penyelenggara kegiatan itu sendiri bisa merupakan badan, instansi pemerintah, organisasi, orang pribadi, ataupun lembaga.

Keberadaan Kampung KB Lingkungan Randegan RW 1 dalam pelaksanaannya memiliki kegiatan yang mana kegiatan tersebut terbagi menjadi dua kelompok kegiatan yang berlangsung sejak awal pembentukannya. Kelompok kegiatannya yaitu Bina Keluarga Balita (BKB) dan Bina Keluarga Remaja (BKR).

1. Bina Keluarga Balita (BKB)

BKB merupakan salah satu kelompok kegiatan yang ada di Kampung KB, adanya kelompok kegiatan BKB sendiri sebagai satu langkah untuk mewujudkan

keluarga kecil berkualitas yang menjadi tujuan utama dari pembentukan Kampung KB. BKB di Kampung KB Lingkungan Randegan RW 1 diberi nama “BKB CERIA”. Bina Keluarga Balita (BKB) ini merupakan wadah kegiatan keluarga yang mempunyai balita, bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balitanya melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan, sosial, emosional serta moral untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka meningkatkan kesertaan, pembinaan dan kemandirian ber-KB bagi pasangan usia subur anggota kelompok kegiatan. Kegiatan BKB ini dilaksanakan rutin dalam setiap bulan dan dijalankan oleh para Kader BKB bersama masyarakat di Kampung KB. Kader BKB Kampung KB beranggotakan 11 wanita yang terdiri dari satu ketua, satu bendahara, satu sekretaris dan delapan anggota, untuk struktur organisasinya dapat dilihat gambar dibawah ini



Gambar 9. Struktur Organisasi BKB CERIA Kampung KB

Sumber : Dokumentasi Penulis, 2018

Kelompok kegiatan BKB CERIA dalam pelaksanaannya memiliki tiga materi kegiatan yaitu:

a) Membina keluarga ibu dan anak

Kualitas generasi di masa datang ditentukan oleh kualitas keluarganya saat ini. Karena itu, upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas harus di mulai sejak keluarga terbentuk atau bahkan sejak perencanaan keluarga. Keluarga juga menjadi tempat aktivitas utama seorang individu berlangsung sehingga tidak heran peran ibu sangatlah penting terutama dalam mendidik, mengasuh, mengasih anaknya. Dalam BKB sendiri terdapat materi kegiatan membina ibu dan anak, yang mana kegiatan itu ditujukan dengan memberikan sosialisasi maupun pengetahuan untuk para ibu dalam membina anak maupun keluarganya. Di BKB CERIA kegiatan ini diadakan satu bulan sekali dan kegiatan ini terintegrasi dengan kegiatan posyandu. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Fatimah selaku Kader BKB, yang mengatakan bahwa

“Materi kegiatan BKB ada tiga yaitu membina keluarga ibu dan anak, tumbuh kembang anak, dan permainan halus dan kasar. Untuk materi kegiatan membina keluarga ibu dan anak, ibu-ibu dilingkungan Kampung KB yang mempunyai anak, terutama anak balita itu dibina. Jadi nanti setiap satu bulan sekali kalau tidak ada posyandu itu diganti dengan memberikan materi kepada ibu-ibu tentang bagaimana membina anak sejak balita, bagaimana menjadi ibu yang cerdas untuk keluarga. Yang memberikan materi biasanya dari salah satu kader BKB.” (Wawancara dilakukan pada tanggal 6 April 2018 di kediaman Pembina Kampung KB)

Hal serupa disampaikan oleh Bapak Matali selaku pembina Kampung

KB Lingkungan Randegan yang mengatakan bahwa:

“Kegiatan BKB itu ya sering dilakukan, biasanya ya dirumah saya ini. Jadi masyarakat yang punya balita itu kumpul disini, nanti kader BKB juga kumpul. Kalau untuk materi kegiatan pembinaan ibu dan anak itu

dilaksanakan oleh para kader BKB dengan memberikan informasi misalnya mengenai bagaimana merawat kesehatan ibu dan anak, terus kegiatan sosialisai dengan materi tentang kebutuhan gizi keluarga” (Wawancara dilakukan pada tanggal 16 Maret 2018 pukul 09.00 dikediaman Pembina Kampung KB).

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan materi kegiatan membina keluarga ibu dan anak di Kampung KB dilaksanakan sebulan sekali. Untuk pelaksanaan dilakukan di rumah Pembina Kampung KB dan pemateri kegiatan juga dari para kader BKB itu sendiri. Dapat dilihat gambar dibawah ini pada saat materi kegiatan sosialisasi tentang kebutuhan gizi keluarga.



Gambar 10. Sosialisai tentang kebutuhan gizi keluarga

Sumber: Dokumentasi Kampung KB, 2018

b) Tumbuh kembang anak

Tumbuh kembang anak adalah proses berkelanjutan, tumbuh kembang ini perlu dilakukan pemantauan secara teratur dan berkala sehingga potensinya bisa dimaksimalkan. Dalam kegiatan tumbuh kembang anak yang dilakukan di Kampung KB berupa adanya posyandu. Hal ini seperti hasil wawancara dengan salah satu Kader KB sekaligus ketua posyandu ibu Fatimah yang mengatakan

“Kegiatan BKB salah satunya seperti hari ini ya selalu ditempat abah matali, selasa pertama pada setiap bulan selalu ada kegiatan balita posyandu. Di Kampung KB RW 1 ini kurang lebih ada 38 balita yang mengikuti posyandu.” (Wawancara dilakukan pada tanggal 6 Maret pukul 09.40 di kediaman Pembina Kampung KB)

Hal serupa disampaikan oleh Ibu Arafah selaku Kader BKB yang mengatakan bahwa:

“Posyandu ini kegiatannya dilakukan sekali pada hari selasa minggu pertama, rutin itu dilakukan. Ibu-ibu yang sedang hamil dan ibu-ibu punya balita dari umur 0-5 tahun itu bisa datang ke rumah Abah Matali untuk penimbangan berat badan anak, untuk mengetahui perkembangan anak kan dapat dilihat dari berat badan, anak sehat bertambah umur bertambah berat badan, itu kan ada catatannya di setiap buku kesehatan ibu dan anak yang selalu dibawa saat posyandu.” (Wawancara dilakukan pada tanggal 6 April pukul 10.30 di kediaman Pembina Kampung KB)

Hal serupa disampaikan oleh Ibu Narti selaku koordinator lapangan Dinas P3AKB, yang mengatakan bahwa:

“Kalau materi kegiatan tumbuh kembang anak itu yang menangani posyandu dan yang melaksanakan itu para kader BKB. Ibu-ibu di wilayah Kampung KB yang punya balita dapat mengikuti kegiatan posyandu ini, gratis tidak bayar *paling paling* cuma bayar buat kas *gitu* Rp 2000 saja. (Wawancara dilakukan pada tanggal 3 April pukul 10.30 di kediaman Pembina Kampung KB)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk materi kegiatan tumbuh kembang anak terintegrasi dengan kegiatan posyandu. Sehingga kegiatan ini menjadi bagian dari kegiatan posyandu, yang mana untuk pelaksanaan kegiatan dilaksanakan setiap bulan sekali pada minggu pertama. Jadi para ibu-ibu di Kampung KB yang mempunyai balita bisa datang ke Posyandu dengan membawa buku posyandu untuk menimbang anaknya sehingga mengetahui tumbuh kembang anaknya. Kegiatan ini diikuti oleh para keluarga yang memiliki balita umur 0-5

tahun dan untuk tempatnya dilaksanakan di rumah Pembina Kampung KB, dapat dilihat gambar dibawah ini tempat pelaksanaan kegiatan posyandu.



Gambar 11. Posyandu di Kampung KB Lingkungan Randegan RW 1

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2018

Sementara itu posyandu yang dilaksanakan rutin ini diikuti oleh para balita yang ada di Kampung KB Lingkungan Randegan RW 1. Dapat dilihat jumlah balita yang mengikuti kegiatan posyandu pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. Keikutsertaan Balita Dalam Kegiatan Posyandu Tahun 2017

No	Kelompok Umur	Jumlah	Posyandu	
			Ikut	Tidak Ikut
1	0- 5 Tahun	91	81	10
	Jumlah	91	81	10

Sumber: Kampung KB Lingkungan Randegan RW 1

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa di Kampung KB Lingkungan Randegan RW 1 jumlah balita yang berumur 0-5 tahun berjumlah 91 balita. Dari jumlah 91 balita tersebut yang mengikuti kegiatan posyandu sebanyak

81 balita. Artinya masih terdapat 10 balita yang tidak mengikuti kegiatan posyandu tersebut.

Ketidakikutsertaan balita dalam kegiatan posyandu disebabkan beberapa alasan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah satu ibu susi selaku salah satu warga yang tidak mengikuti posyandu, yang mengatakan bahwa:

“Anak saya umur lima tahun sudah masuk sekolah paud, menurut saya sudah *gede* jadi *gak* ikutan posyandu mbak. Kalau dulu masih kecil *ya tak* ikutan, sekarang sudah *enggak* kan sudah sekolah juga.” (wawancara dilakukan pada tanggal 3 April pukul 15.00 di kediaman ibu susi)

Hal serupa disampaikan oleh Ibu Mianah salah satu selaku salah satu warga yang tidak mengikuti posyandu, yang mengatakan bahwa:

“*Nggak* ikut posyandu mbak anaknya juga *gak* mau, *lagian* sudah paud juga. Meskipun *nggak* ikut sebagai orang tua saya tetap memperhatikan tumbuh kembangnya.” (Wawancara dilakukan pada tanggal 3 April pukul 16.00 di kediaman ibu Mianah)

Hal serupa disampaikan pula oleh pernyataan Ibu Asminarti selaku Koordinator Lapangan Kampung KB Dinas P3AKB Kota Mojokerto yang mengatakan bahwa:

“Hampir keseluruhan balita di lokasi Kampung KB ikut posyandu, hanya beberapa yang tidak ikut karena alasannya orang tua sibuk bekerja jadi anaknya tidak sempat dibawa ke posyandu, soalnya masyarakat disini sebagian besar kerjanya jadi petani mbak jadi kerjanya dari pagi sampai sore. Terus ada juga yang tidak ikut karena anaknya sudah masuk paud.” (Wawancara dilakukan pada tanggal 3 April pukul 10.30 di kediaman Pembina Kampung KB Lingkungan Randegan RW 1)

Dari beberapa kutipan wawancara yang telah dijabarkan, dapat diketahui dari 91 balita yang ada di Kampung KB terdapat sepuluh balita yang tidak mengikuti kegiatan posyandu. Meskipun kegiatan ini gratis namun tetap saja ada yang tidak

mengikuti, alasannya dikarenakan sang anak tersebut memasuki sekolah paud dan juga karena kesibukkan orang tua sehingga beberapa dari mereka memilih untuk tidak mengikuti posyandu.

c) Permainan gerakan halus dan kasar.

Bermain dapat dikatakan sebagai salah satu kebutuhan mutlak anak yang harus dipenuhi. Para orang tua juga dapat memanfaatkan mainan untuk menstimulus motorik kasar dan halus anak sehingga dapat bertambah cerdas dan juga dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Pada materi ini para orang tua yang memiliki balita berkumpul di rumah pembina Kampung KB untuk berpartisipasi dalam materi kegiatan tersebut. Kader BKB pada materi kegiatan ini akan memberikan materi dan memberikan contoh mainanan apa saja yang dapat menstimulus motorik kasar dan motorik halus. Sehingga dengan adanya pemateri dan informasi yang disampaikan oleh kader BKB dapat menambah informasi bagi Ibu yang memiliki balita. Dapat dilihat gambar di bawah ini contoh materi kegiatan permainan halus dan kasar yang dihadiri para ibu dan balitanya yang ada di Kampung KB.



Gambar 12. Materi kegiatan permainan halus dan kasar

Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2018

Berdasarkan uraian diatas dan observasi penulis dapat disimpulkan bahwa kelompok kegiatan yang sudah dibentuk dan dilaksanakan oleh Kampung KB Lingkungan Randegan salah satunya kelompok kegiatan BKB. Kelompok kegiatan BKB memiliki tiga materi kegiatan yang mencakup pembinaan keluarga ibu dan anak, tumbuh kembang anak dan pembinaan permainan halus dan kasar. Masyarakat di lingkungan Kampung KB terutama para ibu yang punya balita dapat menghadiri materi kegiatan tersebut dimana pematerinya sendiri dari salah satu kader BKB. Kegiatan BKB sendiri menjadi bagian dari pelaksanaan Kampung KB yang mana didalamnya bertujuan untuk mensukseskan berjalannya Program Kampung KB.

2. Bina Keluarga Remaja (BKR)

Bina Keluarga Remaja di Lingkungan Randegan diberi nama “BKR MERPATI”. BKR ini merupakan wadah kegiatan keluarga yang mempunyai anak remaja (10-24 tahun) bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua untuk membina tumbuh kembang anak remaja dalam rangka meningkatkan kesertaan, pembinaan dan kemandirian ber-KB bagi anggota kelompok. Berbeda halnya dengan BKB yang memiliki kader yang cukup banyak, BKR hanya terdiri dari lima orang yang mencakup ketua BKR, sekretaris, bendahara, seksi agama dan seksi sosial. Dapat dilihat struktur organisasi BKR dibawah ini.



Gambar 13. Struktur Organisasi “BKR MERPATI”

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2018

Bagan organisasi diatas terlihat jelas pembagian tugas dan fungsi masing-masing, untuk ketua BKR MERPATI memiliki tugas mengkoordinir segala kegiatan ke dalam kelompok maupun keluar kelompok, maka segala koordinasi tersebut menjadi tanggung jawab ketua. Sekretaris dalam BKR mempunyai tugas mengorganisir segala administrasi baik yang berhubungan dengan notulen kegiatan serta mengarsip segala surat yang masuk maupun keluar. Seksi agama menjadi seksi yang berpengaruh dalam pemberian materi keagamaan di BKR. Koordinasi dengan tokoh agama menjadi dasar fundamental bagi semua orang. Karena dengan agama pendekatan menjadi lebih bisa masuk dan diterima dengan keikhlasan oleh semua orang. Kemudian untuk seksi sosial lebih pada penekanan anggota keakraban kehidupan kelompok kegiatan sebagai makhluk sosial. Dalam pelaksanaannya BKR MERPATI mempunyai dua materi kegiatan yaitu

a) Pembinaan keluarga Pasangan Usia Subur (PUS)

Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami istri masih berusia 15 s/d 49 tahun. Materi kegiatan ini pembinaanya melalui program Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE). Kader BKR memberikan pembinaan berupa pengetahuan dan pemahaman kepada PUS terkait KB. Selain itu memberikan pembinaan terhadap keluarga PUS yang masih punya anak remaja. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Matali selaku ketua BKR MERPATI, yang mengatakan bahwa

“Membina keluarga PUS dilakukan bagi para keluarga yang ada di Kampung KB, keluarga yang memiliki anak remaja dibina. Pembinaan ini untuk menciptakan keluarga kecil sejahtera dan bahagia. Selain itu pembinaan PUS untuk mengurangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).” (Wawancara dilakukan dikediaman Bapak Matali pada tanggal 3 April pukul 11.30)

Hal serupa disampaikan oleh Ibu Asminarti selaku Koordinator Lapangan Kampung KB Dinas P3AKB Kota Mojokerto, yang mengatakan bahwa:

“Kelompok kegiatan BKR itu hampir sama dengan BKB hanya saja untuk BKR itu dikhususkan untuk keluarga yang memiliki remaja. Jadi itu ada semacam pertemuan untuk keluarga yang memiliki anak remaja, nanti para orang tua ini dibina semacam ada Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) antara kader dengan orang tua ini. Selain itu juga ada pembinaan bagi keluarga PUS untuk meningkatkan keluarga sejahtera.” (Wawancara dilakukan pada tanggal 3 April pukul 10.30 dikediaman Pembina Kampung KB)

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa materi kegiatan pembinaan keluarga PUS dilaksanakan di Kampung KB Lingkungan Randegan RW 1 tepatnya dirumah Pembina Kampung KB. Untuk materi

kegiatan diberikan dengan memberikan KIE kepada para keluarga PUS hal ini sebagai upaya untuk mengurangi KDRT dalam keluarga sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan keluarga.

b) Pembinaan Remaja

Remaja sangat rentan terhadap resiko Triad KRR (Seksualitas, NAPZA, HIV dan AIDS). Perilaku seksual yang tidak sehat dikalangan remaja, khususnya remaja yang belum menikah cenderung meningkat. Keluarga memiliki peranan penting dalam membina remaja agar tidak salah mengarungi kehidupan. Keluarga harus mampu menjawab dan mengarahkan setiap permasalahan yang dihadapi remaja terutama menyangkut tentang kesehatan reproduksinya. Agar keluarga menjadi teman curhat maka mereka perlu diberikan pengetahuan yang cenderung mengenai permasalahan remaja. Oleh karena itu di Kampung KB Lingkungan Randegan terdapat kegiatan BKR yang didalamnya terdapat materi kegiatan pembinaan keluarga remaja, yang mana keluarga yang memiliki anak remaja dapat dibina oleh para kader BKR dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai apa saja yang berkaitan dengan remaja agar tidak terjerat kenakalan remaja. Hal ini seperti yang disampaikan Bapak Matali selaku ketua BKR MERPATI, yang mengatakan bahwa

“Pembinaan terhadap anak remaja dengan cara mengarahkan bakat anak sesuai dengan potensinya. Contohnya ikut club bola voli, tenis meja atau ikut bulutangkis. Tujuannya agar anak tersebut tidak terpengaruh minuman keras, narkoba dan kehamilan diluar nikah.” (Wawancara dilakukan di kediaman Bapak Matali pada tanggal 16 Maret pukul 09.00)

Hal serupa disampaikan oleh Ibu Asminarti selaku Koordinator Lapangan Kampung KB Dinas P3AKB Kota Mojokerto, yang mengatakan bahwa:

“Materi kegiatan pembinaan remaja dilaksanakan dengan pemberian informasi konseling untuk keluarga dengan remaja maupun dari remaja itu sendiri. Sehingga informasi yang diberikan oleh kader BKR dapat membantu para remaja dalam menghadapi masa remajanya dan merencanakan masa depannya.” (wawancara dilakukan pada tanggal 3 April pukul 10.30 di kediaman Pembina Kampung KB)

Materi kegiatan yang dilaksanakan kelompok kegiatan BKR diikuti oleh para keluarga yang memiliki remaja. Untuk keikutsertaan keluarga dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. Keikutsertaan Keluarga Remaja Dalam Kegiatan BKR

No.	Kelompok Umur	Jumlah	BKR	
			Ikut	Tidak Ikut
1	10-24 Tahun	159	144	15
	Jumlah	159	144	15

Sumber: Kampung KB, 2018

Dari tabel diatas jumlah keluarga dengan remaja di Kampung KB Lingkungan Randegan RW 1 berdasarkan kelompok umur 10 tahun sampai 24 tahun berjumlah 159 orang. Untuk keluarga remaja yang mengikuti kegiatan BKR sebanyak 144 orang, artinya masih terdapat keluarga remaja yang tidak mengikuti kegiatan BKR sebanyak 15 orang. Ketidakikutsertaan keluarga dengan remaja karena alasan pekerjaan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Narti selaku Koordinator Lapangan Kampung KB Dinas P3AKB, yang mengatakan bahwa:

“Mayoritas masyarakat di lingkungan Kampung KB pekerjaannya sebagai petani jadi *kadang* mereka ini sulit untuk diajak untuk pertemuan kegiatan, karena mereka sibuk dengan pekerjaannya. Sehingga sulit untuk diajak ataupun mengikuti kegiatan BKR ini.” (Wawancara dilakukan pada tanggal 3 April pukul 10.30 dikediaman Pembina Kampung KB)

Hal serupa disampaikan oleh Pak Matali selaku Pembina Kampung KB, yang mengatakan bahwa:

“Kendala pekerjaan seringkali jadi alasan keluarga yang tidak mengikuti kegiatan BKR, namun hal ini saya maklumi karena namanya bekerja kan untuk keluarga juga. Jadi tidak apa-apa.” (Wawancara dilakukan pada tanggal 16 Maret pukul 09.00 dikediaman Pak Matali)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan BKR berlangsung rutin dalam setiap bulan yang dilaksanakan di Kampung KB. Kegiatan BKR sendiri diikuti oleh 144 keluarga dengan remaja, materi kegiatannya berupa KIE dan pembinaan pada keluarga dengan remaja.

Berdasarkan penyajian data yang telah disajikan sebelumnya dapat diketahui kelompok kegiatan yang dilaksanakan di Kampung KB Lingkungan Randegan RW 1 selama ini terdapat dua kelompok kegiatan yaitu BKB dan BKR. Kedua kelompok kegiatan memiliki materi kegiatan masing-masing, yang pada dasarnya semua kegiatan ditujukan untuk masyarakat di lokasi Kampung KB. Kegiatan BKB yang diadakan khusus ditujukan untuk keluarga dengan balita, artinya keluarga yang memiliki balita dapat mengikuti materi kegiatan berupa kegiatan pembinaan keluarga ibu dan anak, tumbuh kembang anak dan kegiatan permainan halus dan kasar. Sedangkan kegiatan BKR khusus untuk keluarga dengan remaja, yang mana materi kegiatannya mencakup pembinaan keluarga PUS dan pembinaan Remaja. Materi kegiatan yang dilaksanakan gratis sehingga masyarakat dapat mengikuti kegiatan tersebut. Meskipun kegiatan yang dilaksanakan gratis masih saja terdapat

masyarakat yang belum tergabung atau mengikuti kelompok kegiatan BKB dan BKR. Ketidakikutsertaan keluarga balita dalam kegiatan BKB karena balita tersebut sudah memasuki usia sekolah sehingga tidak bisa menghadiri kegiatan tersebut. Kemudian untuk ketidakikutsertaan sebagian keluarga pada kegiatan BKB karena alasan pekerjaan.

b. Penganggaran kegiatan

Setiap kegiatan yang telah disusun dalam pelaksanaannya tentu membutuhkan dana atau anggaran. Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang dinyatakan dalam bentuk kegiatan dalam satuan uang yang memiliki tujuan. Sehingga dalam setiap kegiatan yang diadakan memiliki anggaran didalamnya sebagai pembiayaan dari kegiatan itu sendiri. Kampung KB Lingkungan Randegan memiliki dua program kegiatan yaitu BKB dan BKR. Dalam kedua program tersebut memiliki kegiatan masing-masing yang mana dalam setiap kegiatan membutuhkan anggaran untuk pelaksanaannya. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Narti selaku Koordinator lapangan Dinas P3AKB Kota Mojokerto, yang mengatakan bahwa:

“Setiap pelaksanaan kegiatan pasti membutuhkan anggaran. Dana anggaran untuk Program Kampung KB itu dapat tiap bulan dari Dinas P3AKB. Untuk kegiatan rutin BKB dan BKB operasional itu hanya Rp 75.000 saja untuk masing-masing kegiatan. Pernah dapat dana dari BKKBN Jawa Timur hanya untuk plakat didepan itu saja. Sisanya biaya operasional dari swadya masyarakat, ada juga dari kas saat posyandu tapi tidak banyak hanya Rp 2000 saja per orang. Dikatakan kurang dana ya memang kurang, oleh karena itu diharapkan kedepannya ada dana dari luar yang masuk, andaikan ada dana tambahan akan menambah semangat para kader KB.” (Wawancara dilakukan pada tanggal 3 April pukul 10.30 di kediaman Pembina Kampung KB)

Hal serupa disampaikan oleh Bapak Matali selaku Pembina Kampung KB, yang mengatakan bahwa:

“Anggaran kegiatan ini kebanyakan swadya masyarakat saja mbak, karena Kampung KB ini belum menjalin kemitraan dengan pihak luar. Jadi kalau ada kegiatan dananya dapat dari swadya masyarakat, kalau dari dinas dapat juga tapi tidak banyak. Swadaya masyarakat itu misalnya saja masyarakat dalam kondisi tergolong mampu itu menyumbangkan dana saat kegiatan. Atau saya sendiri ini sebagai koordinator juga turut berkontribusi salah satunya membelikan seragam untuk para kader KB, tujuannya dengan dibelikan seragam dapat mendorong semangat para kader KB dalam mengajak masyarakat untuk ber KB maupun saemnat saat ada kegiatan. (Wawancara dilakukan pada tanggal 16 Maret pukul 09.00 dikediaman Bapak Matali)

Hal serupa disampaikan oleh Ibu Raheko selaku Bendahara Kelompok Kegiatan BKB, yang mengatakan bahwa:

“Kalau ada kegiatan BKB gratis mbak, tidak ada pungutan biaya. Sekalipun ada itu RP.2000 untuk posyandu itupun untuk kas dan kadang juga buat arisan saja untuk ibu-ibu yang punya balita itu. Untuk KB juga gratis, serba gratis mbak. Kegiatannya saja juga sering dilakukan disini (rumah Pembina Kampung KB).” (Wawancara dilakukan pada tanggal 27 April pukul 13.00 dikediaman Ibu Raheko)

Sementara itu hal serupa disampaikan oleh Bapak Djunaidi selaku Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB Dinas P3AKB Kota Mojokerto, yang mengatakan bahwa:

“Sumber dana atau anggaran program Kampung KB untuk saat ini hanya berasal dari APBN melalui BKKBN dan juga ada dukungan anggaran dari APBD Kota Mojokerto melalui Dinas P3AKB Kota Mojokerto. Dengan adanya upaya-upaya pengembangan kegiatan yang dilakukan oleh tim kelompok kerja Kampung KB melalui proses integrasi penanganan masalah maka kedepannya dimungkinkan adanya pembiayaan dari lintas sektor yang lain seperti CSR.” (Wawancara dilakukan pada tanggal 9 Maret pukul 14.30 di Ruang Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB Dinas P3AKB Kota Mojokerto)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti dapat disimpulkan anggaran untuk Program Kampung KB diperoleh dari APBD Kota Mojokerto melalui Dinas P3AKB untuk operasional setiap kegiatan BKB maupun kegiatan BKR. Sedangkan anggaran dari BKKBN untuk Program Kampung KB hanya dapat sekali dan dirupakan dalam bentuk plakat saja. Sisanya anggaran kegiatan diperoleh dari swadya masyarakat. Dapat dilihat gambar dibawah ini bantuan dana dari BKKBN Jawa Timur berupa plakat Kampung KB yang terpasang di depan gang sebelum memasuki wilayah Kampung KB.



Gambar 14. Plakat Kampung KB Lingkungan Randegan RW 1

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2018

c. Evaluasi Program

Setiap kegiatan yang selesai dilaksanakan terdapat evaluasi. Evaluasi sendiri merupakan pemeriksaan sistematis dari awal hingga akhir dari suatu peristiwa, kegiatan ataupun program yang telah dijalankan. Evaluasi bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan suatu program agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Perlunya evaluasi sebagai upaya untuk perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan kegiatan yang sama di tahun mendatang. Program Kampung KB merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan keluarga kecil

berkualitas sehingga untuk mencapai output tersebut dalam pelaksanaan Kampung KB diharapkan dapat meningkatkan akseptor KB. Untuk mengetahui capaian akseptor KB dapat dilakukan dengan melakukan evaluasi dari tahun pertama terbentuknya KB hingga berjalannya program ini selama satu tahun. Hal ini dapat dilihat perbandingan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dari awal pembentukan Kampung KB di Lingkungan Randegan RW 1 pada tahun 2016 dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) tahun 2017. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 4. Jumlah PUS menurut kelompok umur tahun 2016

No	Kelompok Umur	PUS		
		Jumlah	Peserta KB	Bukan Peserta KB
1	<15 Tahun	0	0	0
2	<20 Tahun	0	0	0
3	20-29 Tahun	38	30	8
4	30-49 Tahun	187	104	83
5	>50 Tahun	0	0	0
Jumlah		225	134	91

Sumber: Kampung KB Lingkungan Randegan RW 1

Pada tahun 2016 jumlah PUS wanita dari umur 20-49 tahun sebanyak 225 orang, 134 diantaranya sudah menjadi peserta KB dan sisanya 91 orang bukan peserta KB atau belum menjadi akseptor KB. masih banyaknya PUS yang belum menjadi peserta atau akseptor KB karena beberapa alasan, hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Choirun Nisak selaku salah satu warga sekaligus kader BKB, yang mengatakan bahwa:

“Saya sendiri saat ini belum juga menjadi akseptor KB soalnya kan saya baru punya anak satu, jadi belum KB dulu karena masih ingin menambah anak. Biar pas dua gitu mbak sesuai program KB, dua anak lebih baik. Ada beberapa dari masyarakat ada yang belum mengikuti KB alasannya karena masih ingin menambah anak, padahal anaknya sudah ada dua tapi orangnya tidak mau ikut KB. Biasanya ini mereka orangnya agamis, sulit untuk diajak KB karena masih berpikiran banyak anak banyak rezeki.” (Wawancara dilakukan pada tanggal 16 Maret 2018 pukul 11:00 dikediaman pembina Kampung KB)

Pernyataan Ibu Choirun Nisak didukung pula dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Matali selaku pembina Kampung KB Lingkungan Randegan yang mengatakan bahwa:

“Tahun lalu memang masih banyak PUS yang belum menjadi akseptor KB. Lingkungan Randegan ini merupakan lingkungan agamis, jadi masyarakat yang agamis itu dulu berpikinya masih kolot masih menganggap KB haram jadi mereka tidak mau jadi akseptor KB.” (Wawancara dilakukan pada tanggal 16 Maret pukul 09.00 dikediaman beliau)

Hal serupa disampaikan oleh Ibu Narti selaku Koordinator lapangan Dinas P3AKB Kota Mojokerto, yang mengatakan bahwa:

“Untuk tahun kemarin 2016 banyak yang belum ikut program KB karena ada yang hamil jadi tidak mungkin KB, ada juga tidak ikut KB karena mereka KB kalender atau KB tanpa alat kontrasepsi. Terus ada juga karena alasan masih ingin menambah anak. Sehingga tahun 2016 banyak PUS yang belum jadi akseptor KB.” (Wawancara dilakukan pada tanggal 3 April pukul 10.30 di kediaman Pembina Kampung KB)

Dari kutipan wawancara diatas maka dapat disimpulkan untuk evaluasi program Kampung KB berdasarkan tahun 2016 masih banyak yang belum menjadi akseptor KB. Penyebab PUS tidak menjadi akseptor KB karena ada beberapa masyarakat agamis yang masih menganggap KB haram. Selain itu tidak ikut KB karena hamil dan masih ingin menambah anak.

Berbeda dengan tahun 2016 pada awal pelaksanaan Kampung KB yang mana masih banyak PUS yang belum jadi akseptor KB. Pada tahun 2017 jumlah akseptor mengalami peningkatan, dapat dilihat jumlah PUS setelah Kampung KB dilaksanakan pada tabel dibawah ini.

Tabel 5. Jumlah PUS menurut kelompok umur tahun 2017

No	Kelompok Umur	PUS		
		Jumlah	Peserta KB	Bukan Peserta KB
1	<15 Tahun	0	0	0
2	<20 Tahun	2	2	0
3	20-29 Tahun	59	50	9
4	30-49 Tahun	143	111	32
5	>50 Tahun	0	0	0
Jumlah		204	163	41

Sumber: Kampung KB Lingkungan Randegan RW 1

Berdasarkan tabel jumlah PUS menurut kelompok umur wanita tahun 2016 dan 2017 diatas, selama setahun terlihat jelas perbandingan jumlah peserta KB dari awal pembentukan Kampung hingga satu tahun pelaksanaan Kampung KB di Lingkungan Randegan RW 1. Pada tahun 2016 jumlah PUS wanita sebanyak 225 orang sedangkan pada tahun 2017 menurun sebanyak 21 orang. Artinya 21 orang tersebut sudah memasuki usia lansia. Kemudian untuk peserta KB pada tahun 2016 sebanyak 134 orang sedangkan pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebanyak 29 orang, sehingga untuk bukan peserta KB mengalami penurunan juga. Dari perbandingan dua tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa program KB di

Kampung KB mengalami peningkatan dibandingkan sebelumnya pada awal dibentuknya Kampung KB.

Peserta KB atau disebut juga akseptor KB merupakan pasangan usia subur yang menggunakan salah satu alat atau obat kontrasepsi. Alat atau obat kontrasepsi terdiri bermacam-macam mulai dari alat atau obat kontrasepsi jangka panjang yang terdiri dari IUD, MOW, MOP, dan implant. Kemudian untuk alat atau obat kontrasepsi jangka pendek terdiri dari suntik, pil, dan kondom. Para akseptor KB dapat memilih alat atau obat kontrasepsi sesuai keinginan. Namun sejak dibentuknya Kampung KB yang memang bertujuan meningkatkan akseptor KB sekaligus sebagai upaya menekan jumlah penduduk maka masyarakat diharapkan dapat menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang. Karena penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang sangat efektif untuk mengendalikan jumlah penduduk mengingat masa pakaiannya 3-8 tahun. Disisi lain dengan penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang dapat menjarangkan kehamilan dan mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Dari tabel diatas telah diketahui jumlah peserta KB pada tahun 2016 sampai 2017, kemudian untuk alat atau obat kontrasepsi yang digunakan dapat dilihat perbandingannya antara tahun 2016 dengan tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 6. Keikutsertaan Ber KB per MIX Kontrasepsi Tahun 2016

No	Kontrasepsi	Jumlah
1	IUD (Intra Uterine Devices)	8
2	MOW (Metode Operasi Wanita)	5
3	MOP (Metode Operasi Pria)	0
4	Implant	9
5	Suntik	58
6	Pil	43
7	Kondom	11
	Jumlah	134

Sumber : Kampung KB Lingkungan Randegan RW 1

Tabel 7. Keikutsertaan Ber KB per MIX Kontrasepsi Tahun 2017

No	Kontrasepsi	Jumlah
1	IUD (Intra Uterine Devices)	12
2	MOW (Metode Operasi Wanita)	12
3	MOP (Metode Operasi Pria)	1
4	Implant	11
5	Suntik	82
6	Pil	43
7	Kondom	2
	Jumlah	163

Sumber : Kampung KB Lingkungan Randegan RW 1

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan jumlah PUS yang mengikuti KB sesuai dengan jenis kontrasepsi yang digunakan. Dapat dilihat perbandingan jumlah akseptor KB pada tahun 2016 dengan tahun 2017. Terlihat jelas akseptor KB yang menggunakan kontrasepsi IUD mengalami peningkatan sejumlah tiga orang, untuk kontrasepsi MOW mengalami peningkatan juga sejumlah tujuh orang, sedangkan

yang menggunakan MOP yang tadinya tidak ada bertambah menjadi satu orang penggunanya, untuk kontrasepsi implant bertambah tiga orang, untuk metode suntik bertambah cukup banyak yakni 24 orang, untuk kondom mengalami penurunan sebanyak sembilan orang dan untuk metode pil tidak mengalami peningkatan. Sehingga dapat dikatakan untuk metode KB jangka panjang (IUD, MOW, MOP, Implant) mengalami peningkatan sedangkan untuk KB jangka pendek (Suntik, Pil, Kondom) mengalami penurunan meskipun untuk metode suntik bertambah penggunannya, akan tetapi hal ini cukup baik. Mengingat tujuan dari adanya Kampung KB salah satunya adalah meningkatkan akseptor KB terutama meningkatkan akseptor KB untuk menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Arifah selaku Kader BKB Kampung KB di Lingkungan Randegan RW 1, yang mengatakan bahwa

“Sejak dijadikan lokasi Kampung KB mulai ada peningkatan akseptor KB, kader BKB salah satu tugasnya mengajak masyarakat untuk jadi akseptor KB terutama bagi PUS tapi kebanyakan tidak mau menjadi akseptor KB jangka panjang seperti MOW atau Implan, kebanyakan menggunakan metode suntik atau pil. Alasan tidak mau karena takut sakit dan ada juga karena malu soalnya kalau KB jangka panjang dipasang didalam” (Wawancara dilakukan pada tanggal 6 April pukul 10.30 di kediaman Pembina Kampung KB)

Hal serupa disampaikan oleh Bapak Matali selaku Pembina Kampung KB, yang mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah Kampung KB Kelurahan Kedundung sudah terbentuk mulai tahun 2016, Kelurahan Kedundung terpilih karena tingkat pencapaian KB yang rendah belum mencapai lebih dari 42% sehingga dengan adanya Kampung KB terdapat pembinaan dari Kader KB, Dinas P3AKB dan BKKBN sehingga dalam kurun dua tahun dapat meningkatkan meningkatkan akseptor KB.” (Wawancara dilakukan pada tanggal 16 Maret pukul 09.00 di kediaman Bapak Matali)

Evaluasi program Kampung KB dapat dilihat dengan membandingkan akseptor KB sebelum pelaksanaan dengan sesudah pelaksanaan Kampung KB. Hal ini mengingat bahwa program kampung KB dibentuk dengan tujuan meningkatkan akseptor KB yang mana dengan peningkatan akseptor KB dapat menekan jumlah penduduk. Sehingga melalui penyajian data dan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan program Kampung KB di Lingkungan Randegan dapat dikatakan berhasil karena adanya peningkatan pada jumlah akseptor KB. Tidak hanya itu evaluasi program dapat dilihat pula dari jumlah akseptor KB jangka panjang, yang mana dalam pelaksanaan program sudah banyak akseptor yang mau menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang.

d. Koordinasi lintas sektor dan kemitraan.

Koordinasi secara umum ialah sebuah proses menyelaraskan aktivitas kegiatan antara satu pihak dengan pihak lainnya demi mencapai tujuan bersama. Koordinasi ini biasanya dilakukan sebuah organisasi untuk saling bekerja sama dengan organisasi lainnya ataupun dengan berbagai pihak lain dalam mencapai keberhasilan yang diinginkan. Sementara itu koordinasi lintas sektor dapat diartikan sebagai proses penyelarasan antara sektor satu dengan sektor lainnya. Dalam pelaksanaan program Kampung KB terdapat koordinasi. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Narti selaku Koordinator lapangan Dinas P3AKB Kota Mojokerto, yang mengatakan bahwa:

“Koordinasi pasti kita lakukan mbak, terutama antara kader BKB BKR dengan pembina Kampung KB. Soalnya kalau tidak ada koordinasi maka kesulitan nanti dalam menjalankan kegiatan ataupun dalam mengarahkan para kader ini. Begitupula koordinasi dari Dinas P3AKB dengan para pelaksana di Kampung KB langsung. Sedangkan untuk koordinasi lintas sektor masih belum dilaksanakan. Program ini kan termasuk dalam sektor

kesehatan dan kependudukan, sehingga koordinasi kita lakukan dengan puskesmas dengan masyarakat setempat. Masih terbatas seperti itu” (Wawancara dilakukan pada tanggal 3 April pukul 10.30 di kediaman Pembina Kampung KB)

Hal ini serupa disampaikan oleh Bapak Matali selaku Pembina Kampung KB, yang mengatakan bahwa:

“Koordinasi dilakukan antara saya sebagai pembina Kampung KB sekaligus Ketua LSM dengan para kader di Kampung KB. Misalnya saat ada kegiatan diadakan pertemuan, ketika ada kader yang belum paham dapat bertanya, nanti saya yang mengarahkan sehingga nantinya tidak mengalami kesulitan. Selain koordinasi dari internal yang mencakup para pelaksana program untuk koordinasi lintas sektor belum ada. Kalau kerjasama dengan Kampung KB di daerah lain juga belum dilakukan, tapi kalau kerjasama dengan Kampung KB antar Kecamatan di Kota Mojokerto ini masih dalam proses, ini kan mengingat Kampung KB Lingkungan Randegan merupakan yang pertama dibentuk dan sudah mengalami peningkatan. Nah oleh karena itu Kampung KB dari Kecamatan lain itu belajar dari Kampung KB sini atau dapat dikatakan Kampung KB Lingkungan Randegan dijadikan percontohan untuk Kecamatan lain.” (Wawancara dilakukan pada tanggal 16 Maret pukul 09.00 di kediaman Bapak Matali)

Sementara itu hal serupa disampaikan oleh Bapak Djunaidi selaku Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB Dinas P3AKB Kota Mojokerto, yang mengatakan bahwa:

“Sampai saat ini pelaksanaan program Kampung KB di Lingkungan Randegan RW 1 masih belum menjalin kerja sama dengan Kampung KB di Kota lain. Untuk saat ini fokus kegiatan Kampung KB masih diprioritaskan pada pemberdayaan dan peningkatan pelaksanaan kegiatan pada kelompok kegiatan yang ada di Kampung KB. Sedangkan untuk koordinasi tetap dilakukan dari pihak dinas dengan pelaksana lapangan, dari pihak Dinas sendiri mengarahkan mereka yang ada di lapangan sehingga dengan begitu timbul kerjasama yang nantinya dapat mencapai keberhasilan program” (Wawancara dilakukan pada tanggal 9 Maret pukul 14.30 di Ruang Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB Dinas P3AKB Kota Mojokerto)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa koordinasi yang dilakukan dalam pelaksanaan program Kampung KB yakni dengan menjalin kerjasama antar pelaksana seperti para kader dengan pembina Kampung KB maupun dengan pegawai lapangan. Sedangkan untuk kerjasama dengan daerah lain belum dilakukan tetapi untuk kerjasama antar kecamatan dalam satu kota sudah mulai dilakukan. Namun terbatas sebagai percontohan untuk Kampung KB di Kecamatan lain, mengingat Kampung KB Lingkungan Randegan merupakan yang pertama dibentuk. Sementara itu koordinasi lintas sektor belum terjalin, sehingga koordinasi yang ada di program Kampung KB masih terbatas pada sektor kesehatan dan kependudukan saja. Kemudian berdasarkan observasi peneliti melihat sendiri koordinasi yang terjalin antara para kader dengan pembina Kampung KB maupun dengan pegawai dari Dinas P3AKB. Yang mana pada saat pertemuan rutin kader KB terdapat arahan dari pembina agar para kader KB saling membantu satu sama lain, untuk kompak sehingga ikatan kader ini terjalin yang nantinya dapat memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan.

Sementara itu dalam pelaksanaan program kampung KB terdapat kemitraan yang dijalankan. Kemitraan merupakan gabungan dari dua atau lebih individu maupun kelompok untuk melakukan usaha yang dilakukan secara bekerjasama dengan visi yang sama untuk mencapai tujuan dan saling menguntungkan satu sama lain. Kemitraan juga sebagai cara kerjasama untuk menyelesaikan masalah yang ada dan didalam kemitraan terjadi pertukaran informasi. Sampai saat ini pelaksanaan program Kampung KB di Lingkungan Randengan RW 1 masih belum

Menjalin kemitraan yang terikat dengan pihak lain baik swasta CSR maupun dengan Kampung KB di Kota lain. Hal ini seperti yang di sampaikan oleh Bapak Matali selaku koordinator Kampung KB dalam wawancara yang mengatakan bahwa

“Kerjasama dengan LSM maupun swasta masih belum ada, kerjasama masih terbatas dengan masyarakat setempat dalam artian masyarakat yang mampu. Oleh karena itu dengan pembuktian Kampung KB dari tingkat kebersihannya, keamanannya terus ditingkatkan. Tahun ini sudah mulai masuk penawaran kerjasama seperti BAZNAS sedang menawarkan barangkali di sekitar Kampung KB ada rumah yang tidak layak dapat dibantu. oleh karena itu kami terus berusaha memperbaiki Kampung KB sehingga dapat menarik CSR untuk bermitra dengan Kampung KB Lingkungan Randegan RW 1” (Wawancara dilakukan di kediman Bapak Matali pada tanggal 16 Maret pukul 09.00)

Hal serupa disampaikan oleh Bapak Djunaidi selaku Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB Dinas P3AKB Kota Mojokerto, yang mengatakan bahwa:

“Untuk menjalin kerjasama dengan pihak swasta atau dengan CSR belum dilakukan, khususnya yang menyangkut penganggaran. Kedepannya tidak menutup kemungkinan adanya peran serta pihak swasta atau CSR atau dengan LSM. Untuk dapat merealisasikan hal tersebut sudah tentu perlu adanya kerja sama antara tim pokja Kampung KB selaku pengelola Kampung KB dengan pihak Swasta atau LSM yang dapat diajak kerja sama dengan cakupan program kegiatan yang lebih luas.” (Wawancara dilakukan pada tanggal 9 Maret pukul 14.30 di Ruang Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB Dinas P3AKB Kota Mojokerto)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Program Kampung KB di Lingkungan Randegan belum menjalin kemitraan atau kerjasama dengan pihak swasta, CSR ataupun dengan LSM. Hanya saja kedepannya tidak menutup kemungkinan dapat menjalin kerjasama dengan pihak swasta. Disisi lain kemitraan atau kerjasama dilakukan hanya terbatas pada

pemberian materi saat kegiatan berlangsung. Hal ini seperti yang disampaikan oleh disampaikan oleh Ibu Narti selaku Koordinator lapangan Dinas P3AKB Kota Mojokerto, yang mengatakan bahwa:

“Tidak ada kerjasama dengan swasta, hanya ada dengan mendatangkan pemateri dari BNN untuk kegiatan BKR.” (Wawancara dilakukan pada tanggal 3 April pukul 10.30 di kediaman Pembina Kampung KB)

Hal serupa disampaikan oleh disampaikan oleh Bapak Matali selaku Pembina Kampung KB Lingkungan Randegan, yang mengatakan bahwa:

“kalau ada kegiatan terkadang mendatangkan dari pihak luar seperti saat kegiatan BKR mendatangkan dari BNN dan kepolisian untuk memberikan materi tentang bahaya narkoba. Terus untuk BKB mendatangkan materi dari Puskesmas. Akan tetapi dari pihak-pihak ini kami tidak menjalin kemitraan yang terikat. ” (Wawancara dilakukan pada tanggal 3 April pukul 10.30 di kediaman Pembina Kampung KB)



Gambar 15. Pembina Kampung KB bersama pihak Kepolisian setempat dalam acara BKR MERPATI

Sumber: Dokumentasi Kampung KB

Berdasarkan beberapa petikan wawancara yang dijabarkan sebelumnya dapat diketahui koordinasi yang dilakukan dalam pelaksanaan program Kampung KB hanya terbatas kerjasama antar pelaksana seperti para kader dengan pembina Kampung KB maupun dengan pegawai lapangan. Sedangkan untuk koordinasi lintas sektor atau kerjasama dengan Kampung KB di daerah lain belum ada. sementara itu kemitraan yang dilakukan Kampung KB dengan pihak-pihak lain belum ada, namun untuk kegiatan tertentu Kampung KB menggandeng pihak lain. Misalnya untuk pemateri kegiatan mendatangkan dari pihak luar seperti BNN untuk kegiatan BKR maupun untuk BKB dengan pemateri dari puskesmas. Akan tetapi kemitraan yang dijalin tidak terikat, artinya hanya saat diperlukan untuk kegiatan atau acara tertentu.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Kecil Berkualitas

Sebuah program yang telah dirumuskan tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana awal, dalam pelaksanaannya tentu terdapat aspek-aspek yang mempengaruhi baik faktor pendukung ataupun faktor penghambat program itu sendiri. Faktor-faktor itulah yang nantinya memperlihatkan bagaimana kerja keras pihak terkait dalam melaksanakan program tersebut.

a. Faktor Pendukung

Adapun faktor-faktor pendukung dari pelaksanaan program Kampung KB di Lingkungan Randegan RW 1 Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto antara lain:

1) Adanya dukungan tokoh masyarakat dan Partisipasi masyarakat di Lingkungan Kampung KB

Sebuah program tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dari tokoh setempat. Oleh karena itu untuk keberhasilan suatu program maka dalam pelaksanaannya perlu menggandeng para tokoh masyarakat karena tokoh masyarakat merupakan orang yang dipercaya oleh masyarakat setempat dan memiliki pengaruh besar dalam menggerakkan masyarakat. Sejak awal pembentukan Kampung KB di Lingkungan Randegan para tokoh-tokoh masyarakat seperti ketua RT RW, Lurah, PKB/PLKB, ketua PKK dan tokoh agama turut dilibatkan. Sehingga dengan keterlibatan para tokoh masyarakat ini dapat mendukung keberhasilan program. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ketua LPM sekaligus pembina Kampung KB Kelurahan Kedundung bahwa:

“Para tokoh yang ada di lingkungan Kampung KB dilibatkan, salah satunya tokoh agama. Dikarenakan Lingkungan Randegan merupakan wilayah religius sehingga para tokoh agama dari bapak atau ibu dilibatkan, karena tanpa adanya dukungan tokoh agama ini program Kampung KB tidak akan berjalan mulus. Di tokoh agama ada pertemuan semacam tahlillan, kalau tokoh agama paham dengan kondisi wilayah Kampung Kb terkait pengaturan jumlah anak dan tidak bertentangan dengan Al Quran, InsyaAllah ini nanti merupakan program tersendiri untuk mensukseskan kepada warga ditingkat agamisnya. sehingga dukungan dari tokoh agama ini dari peserta tahlillannya, peserta muslimatan diajak secara langsung untuk memberi sosialisasi pada keluarga keluarga yang memiliki pertentangan agama.” (Hasil wawancara pada tanggal 16 Maret 2018 pukul 9.45 di rumah Bapak Matali ketua LPM)

Hal serupa disampaikan oleh Ibu Narti selaku Koordinator Lapangan Dinas P3AKB yang mengatakan bahwa

“Sejak awal pembentukan Kampung KB terdapat dukungan para tokoh masyarakat terutama aparat kelurahan. Kalau ada kegiatan itu aparat kelurahan terlibat dengan mendukung setiap kegiatan yakni dengan menghadiri kegiatan yang diadakan di Kampung KB.” (Wawancara dilakukan pada tanggal 3 April pukul 10.30 di kediaman pembina Kampung KB)

Dukungan tokoh masyarakat seperti Pak Lurah, Pak Camat, ketua RT RW ditunjukkan dengan turut serta dalam kegiatan atau acara yang diadakan di Kampung KB. Kemudian untuk tokoh agama mendukung dengan turut membantu memberikan sosialisasi mengenai arti pentingnya kehadiran anak dalam keluarga dan memberikan informasi bahwa program KB tidak bertentangan dengan agama. Sehingga dengan dukungan tersebut dapat menggerakkan masyarakat untuk turut serta dalam program Kampung KB.

Partisipasi masyarakat sangat penting dan berpengaruh terhadap keberhasilan dari suatu program. Pada awalnya masyarakat Kelurahan Kedundung tidak mengerti dan tidak peduli dengan adanya Kampung KB. Sehingga hal ini membuat para aktor pelaksana gencar memberikan sosialisasi dan pemahaman terkait KB, terkait dampak baik keberadaan Kampung KB di wilayah mereka yang kemudian menjadikan masyarakat secara perlahan mulai mengerti dan turut berpartisipasi untuk mensukseskan program Kampung KB. Salah satu bentuk partisipasinya yakni masyarakat pada akhirnya mau menjadi akseptor KB. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Fatimah selaku kader BKB yang mengatakan bahwa:

“Kampung KB dapat berjalan seperti ini jua karena dukungan dari masyarakat yang mau tergerak untuk mengikuti kegiatan yang ada di Kampung KB. Masyarakat mulai sadar bahwa program ini bagus untuk kemajuan desa mereka sendiri.” (Wawancara dilakukan pada tanggal 6 April pukul 09.40 dikediaman pembina Kampung KB)

Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Bapak Djunaidi selaku Kepala

Bidang Keluarga Berencana DP3AKB Kota Mojokerto bahwa:

“Adanya peningkatan angka kesertaan ber-KB di Lingkungan Kampung KB tersebut khususnya peserta KB dengan menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), yang mana sebelumnya metode ini sulit diterima oleh masyarakat di lokasi Kampung Kb tersebut. Hal ini sebagai bukti peningkatan KIE (Komunikasi Informasi Edukasi) KB yang gencar dilaksanakan di wilayah tersebut.” (Wawancara dilakuakn pada tanggal 9 Maret pukul 14.30 di Kantor Dinas P3AKB Kota Mojokerto)

Kegiatan yang ada tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya kehadiran masyarakat di lingkungan Kampung KB itu sendiri. Keikutsertaan masyarakat sangat didorong agar kegiatan-kegiatan yang ada di Kampung KB dapat terimplementasikan dan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Matali selaku Pembina Kampung KB Lingkungan Randegan RW 1, yang mengatakan bahwa:

“Awalnya masyarakat tidak mengerti dan mereka tidak peduli dengan adanya Kampung KB, kalau masyarakat tidak peduli maka kegiatan yang diadakan sulit berjalan. Oleh karena itu koordinator Kampung KB dan para kader KB bekerjasama mendorong masyarakat dengan memberikan pengetahuan, sehingga masyarakat perlahan memperoleh pengetahuan dan mau ikut.” (Wawancara pada tanggal 16 Maret 2018 pukul 09.00 WIB di kediaman Bapak Matali)

Hal sependapat juga disampaikan oleh Ibu Choirun Nisak selaku Ketua BKB, yang mengatakan bahwa:

“awalnya susah mengajak masyarakat itu, tapi dari kitanya ini para kader mendekati memberikan sosialisasi sehingga mereka memahami keberadaan Kampung KB dan turut berpartisipasi kalau ada kegiatan yang diadakan.” (Wawancara dilakukan pada tanggal 16 Maret 2018 pukul 11:00 di Kediaman Bapak Matali selaku Pembina Kampung KB

Dari hasil wawancara dan obserasi peneliti maka dapat diketahui pada awal pembentukan Kampung di Lingkungan Randegan RW 1 belum diterima sepenuhnya oleh masyarakat di lokasi. Hal ini karena masyarakat belum memahami pentingnya keberadaan program ini, namun karena dukungan para tokoh yang turut membantu mesukseskan program dengan menghadiri kegiatan yang diadakan. Sehingga dapat mengerakan masyarakat untuk turut serta dalam pelaksanaan dari Kampung KB itu sendiri. Selain itu setelah pelaksanaan program masyarakat mulai turut berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang diadakan di Kampung KB.

2) Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan kepada orang lain. Komunikasi sangatlah penting, setiap hari komunikasi selalu ada dalam kehidupan ataupun aktivitas sehari-hari. Dengan komunikasi kita dapat mengerti maksud yang disampaikan oleh orang lain kepada kita, bahkan dengan komunikasi dapat memecahkan permasalahan yang terjadi. Dalam pelaksanaan program tentu para aktor pelaksana membutuhkan komunikasi antara satu dengan yang lain untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Komunikasi dalam program Kampung KB dilakukan antara para aktor dilapangan maupun dari pihak Dinas P3AKB itu sendiri. Tidak hanya itu komunikasi juga dilakukan antara para aktor pelaksana dengan masyarakat di lokasi Kampung KB. hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Narti selaku Koordinator Lapangan Dinas P3AKB, yang mengatakan bahwa:

“setiap kegiatan seperti ini saya, pembina dan para kader bertemu disini saling berkomunikasi satu sama lain menyampaikan apa saja yang perlu disampaikan. Misalnya saja ini ketika kita mendata masyarakat yang belum mengikuti program KB, yang mendata para kader. Namun ada kader yang kesulitan mendata maka kita bantu, asalakan semuanya dibicarakan pasti akan terselesaikan. (Wawancara dilakukan pada tanggal 3 April pukul 10.30 dikedimana pembina Kampung KB)

Hal serupa disampaikan oleh Ibu Fatimah selaku kader BKB, yang mengatakan bahwa:

“komunikasi selalu terjadi diantara para kader, apalagi saat kegiatan berlangsung. Soalnya kader juga sudah ada yang usianya lanjut kadang kurang paham dengan yang disampaikan, maka disini lah komunikasi terjadi antara para kader dengan turut membantu bekerjasama. Sedangkan komunikasi dengan masyarakat sudah pasti dilakukan, para kader BKB ini kan bertugas memberikan sosialisasi maka saat kita memnyampaikan materi kepada masyarkat itu pasti adnaya timbal balik terdapat pesan yang disampaikan kepada masyarkat dan masyrakat mendapati maksud yang disampaikan oleh kader. Kalau tidak ada komunikasi pasti kesuitan untuk kader ini dalam mengajak masyarakat untuk kegiatan di Kampung sini. (Wawancara dilakukan pada tanggal 6 April t 09.40 dikediaman Pembina Kampung KB)

Seperti halnya wawancara diatas ditambahkan pula oleh Pak Matali yang mengtakan bahwa:

“Sebagai pembina saya juga berkomunikasi tidak hanya dengan bawahan tapi juga dengan atasan. Dengan bawahan itu komunikasi saat pertemuan atau saat kegiatan yang saya lakukan dengan para kader. Sementara dengan atasan itu saat kita memberikan laporan kegiatan sudah tentu disitu terjadi komunikasi. Kalau tidak ada komunikasi yang sulit, apalagi ketika terjadi permasalahan yang ada di Kampung KB. setiap kegiatan langkah awal persiapan ada kendala, maka disitu ada komunikasi diantara kami. Karena dnegan begitu kendala tersbeut dapat cepat terselesaikan. (Wawancara dilakukan pada tanggal 16 Maret pukul 09.00 dikediaman beliau)

Dari hasil wawancara dan observasi peneliti, komunikasi memang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan program ini. Mengingat ketiaka kegiatan maupun terdapat masalah yang ada seringkali komunikasi yang dapat menjadi jalan

keluarnya. Peneliti melihat sendiri bagaimana komunikasi yang terjadi antara pembina dengan kader yang saat itu sedang dalam pertemuan untuk membicarakan kegiatan yang akan diadakan. Terdapat komunikasi timbal balik, yang mana ketika kader tidak mengerti tugasnya maka disitu pembina langsung memberikan penjelasan hingga kader benar-benar memahami dan mengerti tugasnya. Selain itu komunikasi juga terjadi antara koordinator dari dinas dengan pembina di lokasi program. Dapat dilihat gambar dibawah, peneliti turut bergabung diantara komunikasi yang sedang terjadi antara kader, pembina dengan koordinator pada saat pertemuan rutin.



Gambar 16. Komunikasi antara Kader, Koordinator Lapangan dan Pembina Kampung KB

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2018

b. Faktor Penghambat

1) Kurangnya Dana Kegiatan

Pelaksanaan Program pasti melibatkan banyak aspek-aspek yang berkaitan satu dengan yang lainnya demi keberhasilan program tersebut. Akan tetapi dari beberapa aspek tidak berjalan sesuai yang direncanakan sehingga dapat menjadi

pengambat dari pelaksanaan program. Dalam pelaksanaan program Kampung KB di Lingkungan Randegan tentunya para aktor pelaksana yang bertindak sebagai pelaksana menemukan beberapa hambatan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program tersebut. Faktor penghambat tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Matali selaku Ketua LPM sekaligus pembina Kampung KB Kelurahan Kedundung, yang mengatakan bahwa:

“Kalau penghambat tidak ada sejauh ini berjalan baik-baik saja, kalau ada masalah yang muncul saat kegiatan misalnya itu langsung dibicarakan jadi permasalahan tidak merambat kemana-mana. Tapi kalau untuk kegiatan itu barangkali penghambatnya pada dana anggaran saja mbak. Dana untuk operasional dapatnya sedikit dari dinas, selain dari dinas selebihnya dapat dari swadya masyarakat tapi bagi masyarakat yang mampu dan mau menyumbangkan dana. (Wawancara dilakukan pada tanggal 16 Maret 2018 pukul 9.45 di rumah Bapak Matali ketua LPM)

Hal yang sama juga dituturkan mengenai kurangnya dana oleh Ibu Narti selaku Koordinator lapangan Dinas P3AKB Kota Mojokerto, yang mengatakan bahwa:

“Sebenarnya kalau penghambat tidak ada selagi ada koordinasi dan kerjasama antar kader KB terutama dengan koordinator Kampung KB sendiri. Tapi kalau untuk kegiatan akan lebih baik jika memperoleh dana yang memadai atau lebih banyak, soalnya selama ini dana dari Dinas P3AKB kan sedikit sisanya juga dari masyarakat dan itupun tidak banyak.” (Wawancara dilakukan pada tanggal 3 April pukul 10.30 di kediaman Pembina Kampung KB)

Berdasarkan penjabaran wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan program Kampung KB yaitu kurangnya dana. Dana yang diberikan oleh Dinas DP3AKB terbilang kurang mencukupi untuk kegiatan BKB maupun BKR. Sehingga selama pelaksanaan program dana tambahan diperoleh dari swadya masyarakat setempat, terutama

masyarakat yang mampu. Selain itu kurangnya dana karena program Kampung KB di Lingkungan Randegan belum menjalin kemitraan dengan pihak lain

2) Usia kader kelompok kegiatan

Program Kampung KB dalam pelaksanaannya terhambat oleh pemahaman kader yang kurang. Hal ini dikarenakan faktor usia sebagian kader sudah masuk usia lansia sehingga berdampak pada kesulitan dalam penerimaan dan penyampaian masalah program atau kegiatan yang dilaksanakan di Kampung KB kepada masyarakat yang ada di lokasi Kampung KB. Pasalnya kader KB mempunyai tugas utama dalam memberikan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) berupa sosialisasi kepada calon akseptor KB untuk menjadi akseptor KB. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Matali selaku pembina Kampung KB yang mengatakan bahwa

“Kader-kader KB ini kan bertugas untuk mensosialisasikan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait KB maupun terkait kegiatan yang ada. Akan tetapi karena sebagian besar usia kader yang sudah masuk usia lansia dan ditambah rendahnya pendidikan kader maka terkadang mereka kesulitan menyampaikan kepada masyarakat. contohnya saja pernah kader itu memberikan sosialisasi ke salah satu warga yang pada saat itu warganya sedang melakukan aktivitas atau bahkan saat warga itu baru pulang kerja. Nah pada momentum yang seperti itu *kan* kurang cocok, jadinya yang disampaikan sulit untuk bisa diterima. Seharusnya kader Kb itu bisa menangkap situasi dan kondisi warga sebelum menyampaikan atau memberikan sosialisai. Misalnya saja saat warga sedang asyik ngobrol didepan teras, *disamperinalah* itu dengan basa basi kemudian bagaimana *ngobrol* enak sehingga nantinya warga ini bisa menangkap informasi yang diberikan, karena apa momennya itu pas pas mereka lagi asyik *ngobrol* dan tidak ada aktivitas kerjaan. Oleh karena itu saya sebagai koordinator kadang memberikan arahan kepada mereka.” (Wawancara dilakukan pada tanggal 16 Maret pukul 09.00 dikediaman beliau)

Hal serupa disampaikan oleh Ibu Narti selaku Koordinator lapangan yang mengatakan bahwa

“Kader kb disini kebanyakan sukarelawan jadi karena kemauan yang tinggi rasa sosial yang tinggi jadi mereka bersedia menjadi kader. Tapi seperti yang mbak lihat sendiri kebanyakan dari mereka ini berusia lanjut jadi ketika ada kegiatan itu kadang mereka kurang bisa memahami menangkap yang dibicarakan, sehingga kitanya ini perlu dengan sabar mengajari mereka, menjelaskan dengan rinci supaya mereka paham dan dapat menyampaikan informasi ke masyarakat nanti dengan benar.” (Wawancara dilakukan pada tanggal 3 April pukul 10.30 dikediaman pembina kb)

Hal serupa disampaikan oleh Bapak Djunaidi selaku Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas P3AKB Kota Mojokerto yang mengatakan bahwa

“Kendala yang dihadapi saat kegiatan dilaksanakan antara lain terbatasnya pengetahuan, tingkat pendidikan sebagian kader KB yang masih rendah dan faktor usia sebagian kader sudah memasuki usia lansia. Sehingga berdampak pada kesulitan dalam penerimaan dan penyampaian informasi kegiatan yang dilaksanakan di kampung kb kepada masyarkat sekitarnya.” (Wawancara dilakukan pada tanggal 9 Maret pukul 14.30 di Kantor Dinas P3AKB)

Hal serupa disampaikan oleh Ibu Fatimah selaku kader dan ketua posyandu Kampung KB, yang mengatakan bahwa:

“Saya sendiri sudah berusia 64 tahun, sudah lama saya jadi kader posyandu sejak tahun 2000an. Jadi kader KB ini kebanyakan dari kader posyandu, sehingga tidak ada pembentukan baru pada saat pembentukan Kampung KB. Karena saya sendiri sudah tua maklum ketika dapat informasi yang kurang jelas saya terus bertanya sama pembina ketika ada tugas yang diberikan juga begitu yang tua tua ini diarahkan. Karena saya masih mau untuk jadi kader KB maka ketika saya kesulitan pasti dibantu sama kader lain atupun dari abah Matali sendiri”. (Wawancara dilakukan pada tanggal 6 Maret dikediaman Pembina Kampung KB Lingkungan RAndegan RW 1)

Dari hasil wawancara diatas didukung dengan data dibawah ini yang menunjukkan kader Kb dan usia para kader sebagai berikut:

Tabel 8. Daftar Nama Kader dan Usia Kader

No	Nama	Pendidikan Terakhir	Usia
1	Hj. Raheko Sutrisnowati	D2	50 Tahun
2	Khoirun Nisak	SMK	36 Tahun
3	Karni	MI	47 Tahun
4	Sutianah	SMA	52 Tahun
5	Hj. Alimah	SMP	48 Tahun
6	Wali'ah	MI	46 Tahun
7	Sukariyati	MAN	46 Tahun
8	Titin Ismunar	SMK	51 Tahun
9	Fatimah	SMP	64 Tahun
10	Khurotin Roiyah	MAN	59 Tahun
11	Arifah	SMP	39 Tahun

Sumber: Kampung KB, 2018

Sehingga berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti dapat disimpulkan bahwa salah satu yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Kampung KB di Lingkungan Randegan yakni faktor usia kader yang sebagian sudah memasuki usia lansia. Karena faktor usia tersebut berdampak pada kesulitan dalam penyampaian informasi. Kader yang terpilih tidak berdasarkan kemampuan melainkan lebih banyak kepada relawan. Disisi lain kader juga berasal dari petugas posyandu yang memang sudah berkecimpung lama dalam kegiatan posyandu

sebelum Kampung KB terbentuk. Sehingga ketika Kampung KB terbentuk para kader posyandu ini otomatis ditugaskan secara langsung menjadi kader KB. Sehingga tidak heran sebagian kader ini memasuki usia lansia karena memang para kader merupakan kader yang sudah terbentuk sebelum Kampung KB ada.

C. Pembahasan Data

1. Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Kecil Berkualitas

Mazmanian dan Sabaiter dalam Agustino (2015:128) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan biasanya dalam bentuk undang-undang, tapi dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau pun keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Mazmanian dan Sabaiter dalam Agustino (2015:128) Program Kampung KB merupakan bagian dari pelaksanaan keputusan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga bahwa dalam pelaksanaan program Kependudukan dan Keluarga Berencana menekankan kewenangan BKKBN tidak hanya terbatas pada masalah Pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera saja, namun juga menyangkut masalah pengendalian penduduk. Oleh karena itu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) membuat program Kampung KB, Kampung KB

merupakan program yang dapat secara langsung bersentuhan dan memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia di seluruh tingkatan wilayah.

Menurut Arikunto dan Abdul Jabar (2014:4) program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan maka program merupakan sebuah sistem, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan bukan hanya satu kali tetapi berkesinambungan. Ada tiga pengertian penting dan perlu ditekankan dalam menentukan program, yaitu:

1. realisasi atau implementasi suatu kebijakan;
2. terjadi dalam waktu relatif lama bukan kegiatan tunggal tetapi jamak berkesinambungan;
3. terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Sesuai dengan pernyataan diatas, program Kampung KB merupakan realisasi dari suatu kebijakan yang disampaikan melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/70/SJ tentang Pencanangan dan Pembentukan Kampung KB. Sehingga dengan adanya surat edaran tersebut Kota Mojokerto membentuk Kampung KB yang berlokasi di Lingkungan Randegan RW 1 Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto. Program Kampung KB yang dibentuk tidak hanya sebatas untuk periode tertentu melainkan berlangsung lama dan berkelanjutan sampai pada tahun berikutnya nanti. Program ini berjalan sebagai upaya pengendalian penduduk dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas, untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan waktu yang cukup lama. Sehingga demi keberhasilan sesuai yang diharapkan maka program ini berkelanjutan tidak ada batas waktu dari pelaksanaan program Kampung KB. Kemudian menurut Arikunto dan Abdul Jabar (2014:4) mengatakan bahwa penentuan program terjadi

dalam organisasi dengan melibatkan banyak orang. Sesuai dengan teori tersebut pelaksanaan program Kampung KB melibatkan banyak orang. Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara peneliti diperoleh hasil bahwa untuk program Kampung KB benar-benar melibatkan banyak organisasi seperti BKKBN, Dinas Kesehatan melalui puskesmas, Dinas P3AKB, dan tokoh masyarakat di lokasi Kampung KB. Selain itu terdapat keterlibatan kelompok kegiatan yang didalamnya mencakup kader-kader kb dan masyarakat yang menjadi bagian dari sasaran program Kampung KB.

Sementara itu menurut Abdullah Menurut Abdullah dalam Rinasti (2017:29) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan suatu program, adapun hal yang harus diperhatikan mengenai tiga unsur yang penting dan mutlak ada, antara lain:

- a. Adanya program yang ingin dilaksanakan, sehingga adanya suatu tujuan dan hasil yang ingin dicapai dalam suatu program tersebut. Pelaksanaan program Kampung KB Lingkungan Randegan RW 1 merupakan dukungan langsung dari BKKBN kepada Dinas P3AKB Kota Mojokerto. Adapun tujuan program sebagai upaya pengendalian penduduk sehingga nantinya dapat mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas. Tujuan tersebut dicapai dengan cara meningkatkan akseptor KB di lokasi keberadaan Kampung KB.
- b. Target *group*, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut dalam bentuk perubahan dan peningkatan, sehingga dari pelaksanaan program tersebut diharuskan memberi hasil positif bagi sekelompok masyarakat yang telah menjadi target. Target *group* Kampung KB sendiri adalah masyarakat

setempat yang mencakup keluarga dengan balita, keluarga dengan remaja dan PUS. Untuk target keluarga dengan balita dibina dalam kegiatan BKB sehingga kelompok target tersebut dapat memperoleh manfaat terkait bagaimana membina dan mendidik balita sehingga bisa mengetahui perkembangan balita tersebut. Kemudian untuk keluarga dengan remaja dan PUS dibina dalam kegiatan BKR. Kelompok target tersebut dapat memperoleh informasi terkait bagaimana membina remaja agar tidak terjadi kenakalan remaja. Sedangkan untuk PUS memperoleh manfaat terkait apa saja yang berkaitan dengan KB baik itu alat kontrasepsi yang digunakan maupun terkait bagaimana mengatur jarak kelahiran anak. Sehingga dapat tercipta keluarga harmonis.

- c. Unsur pelaksana baik organisasi atau perorangan yang bertanggungjawab atas pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan dari proses implementasi tersebut. Dalam hal ini Dinas P3AKB Kota Mojokerto menjadi fasilitator dan sebagai pengawas berjalannya Kampung KB di Lingkungan Randegan RW 1. Sementara pelaksana dalam kegiatan Kampung KB mencakup Pembina Kampung KB dan kader-kader yang terkait.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diartikan bahwa program Kampung KB merupakan program *top down* yang mana program tersebut dirumuskan dari pemerintah pusat dan dijalankan oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Mengingat saat ini menghadapi desentralisasi maka program ini terkesan memaksa pemerintah daerah untuk menjalankan intruksi tersebut. Sehingga mau tidak mau timbul kepatuhan yang terpaksa dari pemerintah daerah untuk turut serta

menjalankan program Kampung KB. Tidak seharusnya program Kampung KB yang diinstruksikan memaksa untuk setiap daerah membentuknya, melainkan menyesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Jika memang daerah sangat perlu membentuk Kampung KB maka daerah bisa membentuk dan begitupun sebaliknya. Akan tetapi yang terjadi di lapangan pemerintah pusat terus menekan semua daerah yang ada di Indonesia untuk segera membentuk Kampung KB bahkan pemerintah pusat terus memperbanyak jumlah Kampung KB yang ada diseluruh kecamatan di Indonesia. Terhitung sejak awal pencanangannya pada tahun 2015 sampai tahun 2018 di Kota Mojokerto telah terbentuk tiga Kampung KB yang tersebar di setiap kecamatannya. Salah satunya yang berada di Kecamatan Magersari.

Dari hasil wawancara dan penelitian dapat dilihat bahwa Kampung KB yang terbentuk di Mojokerto tepatnya di Lingkungan Randegan Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari merupakan satu kepatuhan yang ditunjukkan untuk menjalankan intruksi dari BKKBN pusat. Hal ini terbukti dari hasil wawancara dengan kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas P3AKB Kota Mojokerto dikatakan memang dibentuknya Kampung KB ini sebagai upaya menjalankan perintah dari atasan atau dari pemerintah pusat. Terbukti pula pada saat peresmian Kampung dihadiri langsung oleh ketua BKKBN pusat yakni Bapak Surya Chandra Surapaty. Jika dilihat dari sisi lain sebelum program Kampung KB dicanangkan oleh pemerintah pusat, di Lingkungan Randegan sendiri sudah terdapat kader-kader untuk penyuluhan KB dan kader-kader posyandu. Sehingga pada saat pembentukan Kampung KB tidak ada perubahan kader-kader

maupun para penyuluh KB. Artinya program Kampung KB dapat dikatakan sebagai inovasi atau pembaharuan saja yang pada intinya dalam kehidupan nyata program yang dimaksudkan sudah terbentuk sejak lama. Akan tetapi karena program ini termasuk *top down* maka dalam pelaksanaannya dan pengawasan setiap kegiatannya mengikuti peraturan dari pemerintah pusat.

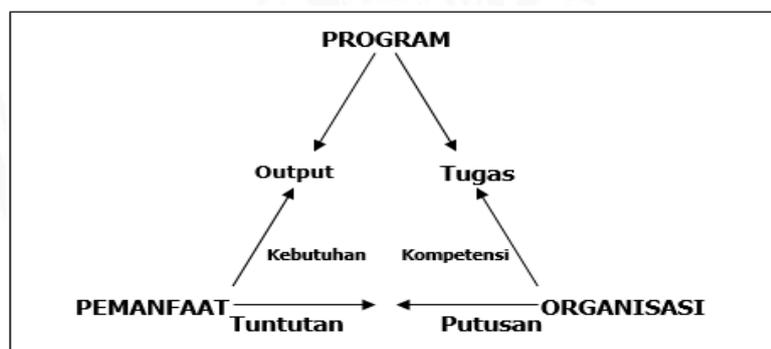
a. Kegiatan di Kampung KB

Program Kampung KB merupakan salah satu program yang dicanangkan agar dapat menekan laju pertumbuhan penduduk. Sehingga program Kampung KB dapat mewujudkan keluarga kecil berkualitas yang menjadi tujuan utama dari awal pembentukannya, sesuai yang disampaikan oleh BKKBN dalam buku petunjuk teknis Kampung KB tahun 2015. Keluarga berkualitas menurut definsi versi baru BKKBN ialah keluarga sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sejahtera berarti sebuah keluarga dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, sehat mencakup sehat jasmani, rohani dan sosial. Maju bermakna memiliki keinginan untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan diri dan keluarganya guna meningkatkan kualitasnya. Berjiwa mandiri diartikan memiliki wawasan, kemampuan, sikap dan perilaku tidak tergantung pada orang lain. Kemudian jumlah anak ideal ialah jumlah anak dalam keluarga yang diinginkan dan dianggal sesuai dengan kemampuan keluarga, namun tetap memperhatikan kepentingan sosial. Berwawasan berarti memiliki pengetahuan dan pandangan yang luas, sehingga mampu, peduli dan kreatif dalam upaya pemenuhan kebutuhan

keluarga dan masyarakat secara sosial. Harmonis mencerminkan kondisi keluarga yang utuh dan mempunyai hubungan yang serasi diantara semua anggota keluarga. Yang terakhir bertakwa berarti taan beribadah dan melaksanakan ajaran agamanya.

Untuk dapat mewujudkan keluarga kecil berkualitas sesuai dengan indikator yang disampaikan BKKBN maka dalam pelaksanaan program Kampung KB terdapat berbagai kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Kegiatan yang ada di Kampung KB Lingkungan Randegan RW 1 yaitu Bina Keluarga Balita (BKB) dan Bina Keluarga Remaja (BKR).

Pelaksanaan Program Kampung KB dapat digambarkan dengan teori model kesesuaian implementasi program yang diungkapkan oleh David C. Model. Model ini berintikan kesesuaian antara tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program, yaitu digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1: Model Kesesuaian Implementasi Program

Sumber: David C. Korten (1988) dalam Haedar Akib dan Antonius Tarigan (2000:12)

Korten dalam Tarigan (2000:12) menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program, yaitu:

1. Program

Kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Programnya Kampung KB sementara pemanfaatnya yaitu masyarakat yang mencakup keluarga, remaja, PUS, keluarga dengan balita, keluarga dengan remaja, dan keluarga dengan lansia. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis kesesuaian program dengan pemanfaat (kelompok sasaran) masih belum mencakup keseluruhan sasaran. Hal ini karena masih terdapatnya pemanfaat (kelompok sasaran) yaitu keluarga lansia yang belum terbentuk khusus untuk kelompok kegiatannya. Sementara itu pada kelompok kegiatan BKB sudah mencakup kelompok sasaran atau pemanfaat yang mana BKB ditujukan khusus untuk keluarga dan keluarga dengan balita. Sedangkan untuk kegiatan BKR pemanfaatnya sudah mencakup remaja, PUS, dan keluarga dengan remaja. Sehingga dapat disimpulkan kesesuaian program Kampung KB dengan pemanfaat sejauh ini sudah berjalan cukup baik namun masih terdapat kelompok sasaran yakni keluarga lansia yang belum dibentuk kelompok kegiatannya.

2. Organisasi

Korten dalam Tarigan (2000:12) menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Program Kampung KB merupakan program yang dicanangkan oleh Presiden RI Joko Widodo pada tahun 2015 dengan mengintruksikan kepada BKKBN untuk membuat program inovasi yang dapat

membantu menekan laju pertumbuhan penduduk dan dapat menjadi ikon BKKBN. Berdasarkan tersebut BKKBN menginstruksikan kepada BKKBN yang ada di daerah diseluruh wilayah Indonesia untuk mencangkan Kampung KB di setiap kabupaten/kota. Untuk itu BKKBN Jawa Timur mencanangkan kabupaten/ kota di wilayah provinsi untuk membentuk Kampung KB, salah satunya Kota Mojokerto. Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinas P3AKB), lokasi pertama yang dibentuk Kampung KB di Lingkungan Randegan Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari.

Berdasarkan penjabaran diatas dapat dikatakan bahwa organisasi pelaksana dalam program Kampung KB yaitu BKKBN pusat, BKKBN Jawa Timur, Dinas P3AKB Kota Mojokerto dan pengelola Kampung KB itu sendiri. Organisasi pelaksana tersebut memiliki tugas untuk melaksanakan program Kampung KB agar dapat mencapai tujuan menekan laju pertumbuhan penduduk dan tujuan umum dalam petunjuk teknis Kampung KB yakni sebagai upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Untuk mencapai tujuan tersebut maka organisasi pelaksana harus memiliki kemampuan yang cukup. Dari hasil wawancara dan pengamatan penulis kesesuaian program Kampung KB dengan kemampuan organisasi pelaksana dalam pelaksanaannya di lokasi sudah berjalan dengan baik. Karena pada saat pengamatan penulis melihat sendiri terdapat kemampuan dalam hal komunikasi ketika kegiatan berlangsung, yang mana terjadi komunikasi yang baik antara koordinator lapangan dari Dinas P3AKB dengan para kader KB yang merupakan bagian dari pengelola di Kampung KB. Selain itu pada saat kegiatan BKB dan BKR sudah terdapat kesesuaian tugas diantara para pelaksananya.

3. Pemanfaat

Korten dalam Tarigan (2000:12) menyatakan bahwa kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program. Dalam pelaksanaan program Kampung KB terdapat kegiatan BKB dan BKR yang mana output dari program tersebut dapat mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara peneliti diperoleh hasil bahwa materi-materi kegiatan BKB yang terdiri dari pembinaan keluarga ibu dan anak, tumbuh kembang anak dan permainan halus dan anak, ketiga materi tersebut dalam pelaksanaannya dilakukan oleh organisasi yang berkaitan yakni puskesmas dan Dinas P3AKB. Kemudian untuk kegiatan BKR yang terdiri dari materi kegiatan pembinaan keluarga PUS dan pembinaan remaja, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas P3AKB dan organisasi di Kampung KB itu sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program Kampung KB terdapat kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana.

b. Penganggaran kegiatan

Program tanpa di dukung dengan sumber-sumber yang memadai maka dalam pelaksanaannya tidak bisa berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Salah satunya yaitu sumber dana untuk menjalankan program tersebut. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Van Metter & Van Horn dalam Agustino (2016:132-135) bahwa terdapat beberapa variabel yang dapat mempengaruhi implementasi salah satunya variabel sumber daya. Keberhasilan

proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tetapi di luar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan waktu.

Berdasarkan hasil wawancara dan temuan peneliti di situs penelitian, pelaksanaan program Kampung KB di Lingkungan Randegan RW 1 masih kurang memadai terutama dalam hal sumber daya finansial. Sumber daya finansial untuk pelaksanaan program terbilang kurang mencukupi, pasalnya sumber anggaran utama yang diperoleh untuk kegiatan hanya berasal dari Dinas P3AKB saja. Dana yang di dapat untuk kegiatan BKB dan BKR hanya sebesar Rp 75.000 per bulannya, sementara dalam kegiatan BKB dan BKR memiliki materi kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap bulannya. Selibhnya sumber dana yang diperoleh berasal dari swadya masyarakat, akan tetapi dana yang diperoleh tidak tentu karena dana tersebut didapat dari masyarakat yang mampu dan mau menyumbangkan dananya.

Selain itu dari hasil pengamatan penulis saat mengikuti materi kegiatan BKB terlihat jelas untuk penyediaan konsumsi selama kegiatan berlangsung diperoleh dari swadya pembina Kampung KB yang bersedia memberikan konsumsi untuk kader BKB. Saat pertemuan tribina kader atau rapat kader dilaksanakan disalah satu rumah kader BKB yang secara sukarela bersedia rumahnya dijadikan untuk pertemuan. Kemudian dari hasil wawancara dengan pembina Kampung KB juga diketahui bahwa ada beberapa seragam yang diberikan untuk kader BKB berasal dari swadya masyarakat. Sehingga dari penjabaran tersebut dapat disimpulkan

selama pelaksanaan kegiatan di Kampung KB dana yang diperoleh terbilang kurang karena seringkali dana diperoleh dari swadya masyarakat ataupun swadya pengelola Kampung KB. Jika dana untuk pelaksanaan kurang maka dapat menghambat keberhasilan dari program itu sendiri. Disisi lain Kampung KB belum menjalin kerjasama dengan swasta, LSM maupun CSR sehingga dana yang diperoleh hanya mengandalkan dari Dinas P3AKB maupun dari swadya masyarakat. Oleh karena itu kedepannya diharapkan program Kampung KB dapat memperoleh dana dari berbagai instansi seperti CSR ataupun swasta, untuk memperoleh dana tersebut Kampung KB juga berusaha berbenah dari segi kebersihan dan keamanan Kampung KB itu sendiri.

c. Evaluasi Program

Evaluasi program Kampung KB dapat dilihat dengan menganalisis dan membandingkan data pada satu objek yakni akseptor KB sebelum pelaksanaan dengan sesudah pelaksanaan Kampung KB. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Wirawan dalam Munthe (2015:7) yang mengatakan bahwa evaluasi sebagai riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi. Pada hasil analisis dan perbandingan jumlah akseptor KB dan jumlah pengguna alat kontrasepsi pada program Kampung KB dari tahun 2016 samapi tahun 2017 mengalami peningkatan yang cukup baik. Selain itu akseptor KB yang menggunakan alat kontrasepsi MJP sudah mulai meningkat. Sehingga dari

perbandingan ini dapat ditarik suatu keputusan bahwa program Kampung KB ini dapat dilanjutkan sehingga kedepannya dapat mencapai keberhasilan program.

Menurut Arikunto dan Abdul Jabar dalam Tulung (2014:4) ada empat kemungkinan kebijakan yang dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program yaitu:

- 1) Menghentikan program, karena dipandang bahwa program tersebut tidak ada manfaatnya, atau tidak dapat terlaksana sebagaimana diharapkan.

Berdasarkan hasil evaluasi program yang telah disajikan maka program Kampung KB terlaksana sebagaimana mestinya karena selama berjalannya program sampai tahun ini telah menunjukkan manfaatnya kepada masyarakat setempat. Manfaat dari program ini telah dirasakan oleh masyarakat melalui kegiatan BKB dan BKR yang rutin dilaksanakan. Manfaat diperoleh juga dari peningkatan akseptor KB dan peningkatan pengguna kontrasepsi MJP di Kampung KB.

- 2) Merevisi program, karena ada bagian-bagian yang kurang sesuai dengan harapan (terdapat kesalahan tetapi tidak sedikit).

Untuk poin kedua pelaksanaan Program Kampung KB berdasarkan hasil evaluasi memang perlu untuk direvisi sedikit. Revisi yang dilakukan bukan pada isinya melainkan hanya pada kontennya, hal ini karena tribina kelompok kegiatan seharusnya sudah terbentuk sebelum program benar-benar dilaksanakan. Tribina yang dimaksudkan yakni BKB, BKR dan BKL, akan tetapi pada kenyataan di lapangan di Kampung KB Lingkungan Randegan kelompok kegiatan BKL belum diluncurkan ataupun

diresmikan. Sehingga hal ini perlu menjadi tambahan di Kampung KB untuk kedepannya.

- 3) Melanjutkan program, karena pelaksanaan program menunjukkan bahwa segala sesuatu sudah berjalan sesuai dengan harapan dan memberikan hasil yang bermanfaat.

Program Kampung KB dalam pelaksanaannya menunjukkan harapan karena dari evaluasi program selama satu tahun terdapat peningkatan akseptor KB maupun pada penggunaan alat KB nya. Hal ini sesuai dengan harapan pembentukan Kampung KB yang salah satu tujuannya menekan laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan akseptor KB. sehingga program ini bisa untuk terus dilanjutkan.

- 4) Menyebarkan program (melaksanakan program ditempat lain atau mengulangi lagi program di lain waktu, karena program tersebut berhasil dengan baik, maka sangat baik jika dilaksanakan lagi di tempat dan waktu lain.

Program Kampung KB di Lingkungan Randegan tergolong berhasil, sehingga dalam hal ini program Kampung KB dapat dilanjutkan dengan pembentkan Kampung KB didaerah-daerah yang belum terbentuk.

Dari hasil evaluasi diperoleh hasil bahwa program Kampung KB selama satu tahun berjalan telah menunjukkan hasil dalam peningkatan jumlah akseptor KB dan juga peningkatan penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang. Program Kampung KB jika dikaitkan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada indikator pertama SDGs menurut BPS Tahun 2015 dikatakan bahwa indikator yang melekat

pembangunan manusia diantaranya pendidikan dan kesehatan. Maka program Kampung KB yang menekankan pada peningkatan akseptor KB ini termasuk dalam pembangunan manusia pada bidang pelayanan kesehatan. Disisi lain Kampung KB tidak hanya terbatas pada usaha peningkatan akseptor KB melainkan juga menekankan pada kesehatan keluarga ibu dan anak, kesehatan keluarga dengan remaja dan kesehatan keluarga dengan lansia. Tentu hal ini sesuai dengan tujuan ketiga dari SDGs yakni menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan disegala usia. Target 3A yang bertujuan mengakhiri kematian anak, kematian ibu dan kematian akibat penyakit pada penduduk usia kurang dari 70 tahun.

d. Koordinasi lintas sektor dan kemitraan.

Koordinasi menurut Chung dan Megginson dalam Wahyuni (2013:2) didefinisikan sebagai proses motivasi, memimpin dan mengkomunikasikan bawahan untuk mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan hasil observasi dalam pelaksanaan program Kampung KB terdapat koordinasi antar aktor pelaksana, yang mana terjadi proses komunikasi antara atasan seperti Pembina Kampung KB dnegan bawahan yakni para kader KB ataupun koordinasi yang terjalin antara Dinas P3AKB dengan para pelaksana di lapangan. Akan tetapi untuk koordinasi dengan lintas sektor lain belum ada. Jadi koordinasi yang dilakukan Kampung KB di Lingkunagn Randegan RW 1 masih dalam lingkup sektor kesehatan dan kependudukan saja.

Menurut Hafsa dalam Prakastya (2016:36) kemitraan merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu

tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Dari teori yang dikemukakan oleh Hafsah dan melihat hasil temuan dilapangan bahwa pelaksanaan program Kampung KB di Lingkungan Randegan belum menjalin kemitraan dengan pihak manapun baik dari pihak pemerintah seperti BNN maupun dari pihak swasta seperti CSR. Akan tetapi dalam melaksanakan materi kegiatan pernah mendatangkan pihak lain seperti dari BNN dan kepolisian, namun hal tersebut tidak termasuk dalam kemitraan yang mengikat dan tidak berkelanjutan, artinya hanya terjalin pada saat acara atau kegiatan diadakan.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Kecil Berkualitas

a. Faktor Pendukung

1) Adanya dukungan tokoh masyarakat dan Partisipasi masyarakat di Lingkungan Kampung KB

Menurut Buku Petunjuk Teknis Kampung KB salah satu persyaratan pembentukan Kampung KB yaitu partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaan seluruh kegiatan yang akan dilakukan di kampung KB secara berkesinambungan guna meningkatkan taraf hidup seluruh masyarakat yang di wilayahnya. Berdasarkan hal tersebut Kampung KB dalam pelaksanaannya telah memenuhi persyaratan sesuai buku petunjuk pembentukan Kampung KB. Dari hasil wawancara dan observasi peneliti maka dapat diketahui Kampung di Lingkungan

Randegan RW 1 dalam pelaksanaannya terdapat dukungan para tokoh yang turut membantu mesukseskan program dengan menghadiri kegiatan yang diadakan. Sehingga dapat mengerakan masyarakat untuk turut serta dalam pelaksanaan dari Kampung KB itu sendiri. Masyarakat mulai turut berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang diadakan di Kampung KB.

2) **Komunikasi**

Pentingnya informasi dalam kehidupan organisasi yang dapat kita peroleh melalui komunikasi. Kejelasan komunikasi dalam pelaksanaan program program sangat diperlukan guna dapat mencapai tujuan keberhasilan suatu program tersebut. Komunikasi menurut Argiris dalam Nurrohim dan Anatan (2009:2) mendefinisikan komunikasi sebagai suatu proses dimana seseorang, kelompok, atau organisasi mengirimkan informasi pada orang orang lain, kelompok atau organisasi.

Kejelasan dalam komunikasi program Kampung ini dengan cara pertemuan rutin yang dilakukan antara pembina, kader-kader, dan koordinator Kampung KB. pertemuan rutin dilakukan supaya para pelaksana ini dapat memperoleh informasi yang jelas sehingga dapat meminimalisirr kesalah pahaman. Disisi lain komunikasi dilakukan agar para pelaksana ini mengerti dan memahami maksud dan tujuan program Kampung KB sehingga dalam pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan harapan. Seperti halnya yang disampaikan oleh Argiris, dalam pelaksanaan program Kampung KB terdapat proses penyampaian informasi antara pembina dengan kader maupun antara koordinator lapangan Dinas P3AKB dengan pelaksana di lapangan. Terdapat komunikasi timbal balik, yang mana ketika kader tidak

mengerti tugasnya maka disitu pembina langsung memberikan penjelasan hingga kader benar-benar memahami dan mengerti tugasnya.

b. Faktor Penghambat

1) Kurangnya Dana Kegiatan

Pelaksanaan suatu program harus meliputi beberapa sumber-sumber penting untuk mencapai tujuan program tersebut. Salah satu sumber penting yang harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan program adalah sumber daya finansial atau dana. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Van Metter & Van Horn dalam Agustino (2016:132-135) bahwa terdapat beberapa variabel yang dapat mempengaruhi implementasi salah satunya variabel sumber daya. Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tetapi di luar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial. Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa yang menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan program Kampung KB yaitu kurangnya dana. Dana yang diberikan oleh Dinas DP3AKB terbilang kurang mencukupi untuk kegiatan BKB maupun BKR. Sehingga selama pelaksanaan program dana tambahan diperoleh dari swadya masyarakat setempat, terutama masyarakat yang mampu. Selama pelaksanaan kegiatan di Kampung KB dana operasional kegiatan hanya diperoleh sebesar Rp 75.000 untuk setiap kegiatan BKB dan BKR. Dana tersebut tidak sebanding dengan kegiatan yang dilaksanakan,

pasalnya dalam pelaksanaan kegiatan baik BKB maupun BKR memiliki materi kegiatan yang banyak. Dilain sisi dana tambahan diperoleh dari swadya masyarakat, akan tetapi daa tersebut tidak pasti ada. Sehingga kurangnya dana program Kampung KB menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaannya.

2) Usia kader-kader kelompok kegiatan

Sumber daya menjadi faktor penting dalam keberhasilan suatu program, jika dalam suatu program kekurangan sumberdaya, maka implementasi tersebut tidak akan berjalan secara efektif dana kan menyebabkan program tersebut sulit untuk mencapai tujuan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Van Metter & Van Horn dalam Agustino (2016:132-135) bahwa salah satu variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Dari teori tersebut maka dapat diketahui jika sumber daya manusia yang dimiliki kurang memumpuni maka berdampak pada pelaksanaan kebijakan ataupun program. Dalam pelaksanaan Kampung KB di Lingkungan Randegan kader-kader KB merupakan sumber daya yang dapat mempengaruhi berjalannya program. Berdasarkan hasil observasi, kader-kader KB kurang memumpuni hal ini dikarenakan faktor usia kader yang sebagian sudah memasuki usia lansia. Sehingga berdampak pada kesulitan dalam penyampaian informasi.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan data serta penemuan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat diambil sebuah kesimpulan apabila pelaksanaan program Kampung KB sebagai upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sejauh ini telah berjalan lancar, namun masih terdapat kekurangan. Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Kelompok Kegiatan di Kampung KB sejauh ini berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa masyarakat yang belum mengikuti kegiatan BKB dan BKR.
- b. Sejalan ini anggaran kegiatan di Kampung KB diperoleh dari Dinas P3AKB dan swadya masyarakat, namun anggaran tersebut kurang mencukupi.
- c. Evaluasi program rutin dilakukan dalam satu tahun sekali, untuk evaluasi program Kampung KB ditunjukkan dengan data akseptor KB dan alat kontrasepsi yang digunakan. Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa dalam evaluasi dari awal pembentukan tahun 2016 hingga pada tahun 2017 mengalami peningkatan akseptor KB dan alat kontrasepsi MJP sudah mulai digunakan oleh PUS. Sehingga evaluasi program selama satu tahun pelaksanaan program Kampung KB dapat dikatakan berhasil.

- d. Koordinasi Lintas Sektor dan Kemitraan dalam pelaksanaan program Kampung KB di Lingkungan Randegan belum menjalin koordinasi lintas sektor dan belum terdapat kemitraan yang terjalin dengan pihak lain.

Selanjutnya berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ditemukan faktor yang menghambat dari pelaksanaan program Kampung KB di Lingkungan Randegan RW 1 sebagai upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas dapat disebabkan dari beberapa aspek, yaitu sebagai berikut:

- a. Kurangnya dana anggaran dalam pelaksanaan kegiatan di Kampung KB. Mengingat dana yang diperoleh hanya bersumber dari Dinas P3AKB dan swadya masyarakat. sementara dari swadya dari masyarakat belum tentu ada untuk setiap kegiatan., karena dana yang diperoleh hanya dari masyarakat yang mampu dan mau membantu saja.
- b. Kader-kader yang ada di Kampung KB sebagian besar sudah memasuki usia lansia. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan di Kampung KB mengalami kesulitan dalam penyampaian informasi dari atasan ke bawahan. Hal ini disebabkan pula pada saat pembentukan kader-kader kelompok kegiatan tidak dibentuk kader baru, kader yang ada pada saat ini merupakan kader lama dan itupun kadernya berawal dari kader posyandu. Selain itu kader terbentuk tidak berdasarkan kemampuan, hanya dipilih berdasarkan kemauan dan kesediaan rasa sosiald dari kader itu sendiri.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya serta dari hasil penelitian, maka peneliti mencoba memberikan saran sebagai bahan evaluasi dari pelaksanaan program Kampung KB sebagai upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas di Lingkungan Randegan RW 1 Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto. Adapun saran yang diberikan peneliti sebagai berikut:

- a. Menambah kelompok kegiatan BKL karena sasaran khusus untuk lansia belum terbentuk kelompok kegiatannya. Kelompok kegiatan BKL dibentuk untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga lansia ataupun keluarga yang terdapat lansianya. Selain itu membentuk Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) hal ini guna membantu para keluarga di Kampung KB untuk mengatur perekonomian keluarga. Disisi lain dengan dibentuknya UPPKS sesuai dengan arahan BKKBN yakni bertujuan untuk mengajak keluarga aktif bergerak dalam ekonomi produktif, mensosialisasikan pengelolaan keuangan keluarga, meningkatkan ketahanan dan kemandirian keluarga, mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.
- b. Menjalin kemitraan yang terikat dan berkelanjutan dengan instansi seperti BNN dan kepolisian setempat terkait pembinaan khusus untuk keluarga remaja. Sehingga dalam kegiatan pembinaan tersebut dapat memperkaya pengetahuan untuk para keluarga dengan remaja mengenai berbagai bahaya kenakalan remaja. Menjalin kerjasama dengan swasta ataupun CSR sehingga dapat memperoleh dana tambahan. Hal ini karena adanya

rencana pembangunan WC disetiap rumah warga Kampung Keluarga Berencana yang belum mempunyai WC , sehingga dana yang dibutuhkan banyak. Oleh karena itu diharapkan kedepannya Kampung KB Lingkungan Randegan RW 1 dapat menjalin kerjasama dengan pihak swasta yang dapat mendorong rencana kegiatan tersebut. Disisi lain dapat menjalin kerjasama dengan pihak swasta terutama perusahaan yang menyediakan alat kontrasepsi, sehingga dengan adanya kerjasama dapat mendukung keberhasilan Kampung KB dengan memudahkan akseptor KB dalam memperoleh alat kontrasepsi gratis.

- c. Mengganti kader yang berusia lanjut dengan merekrut kader baru untuk kelompok kegiatan, perekrutan dengan memperhatikan kemampuan kader dan usia calon kader.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta.
- Ali, Muhammad. 2006. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Genta Press.
- Akib, Haedar dan Tarigan, Antonius. 2000. Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya. *Dalam Jurnal Baca Kebijakan Publik*. Jakarta
- Arikunto, Suharsini dan Abdul Jabar, Cipi Safruddin. 2014. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara Barat.
- Badan Pusat Statistik. 2010. "Jumlah dan Distribusi Penduduk", diakses pada tanggal 5 November 2017 dari <http://sp2010.bps.go.id/>.
- Badan Pusat Statitistik. 2015. *Indeks Pembangunan Manusia*. Jakarta: Katalog BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Kota Mojokerto Dalam Angka*. Mojokerto: Katalog BPS.
- BKKBN. 2015. *Petunjuk Teknis Kampung KB*. Jakarta: BKKBN
- BKKBN. 2017. "Profil BKKBN". <https://www.bkkbn.go.id/pages/tugas-pokok-dan-fungsi>. (diakses pada tanggal 11 Desember 2017)
- Desideria, Benekdikta. "Program KB Tak Sukses Dulu Kenapa?". <https://www.liputan6.com/health/read/2096072/program-kb-sekarang-tak-sukses-dulu-kenapa> (diakses tanggal 27 Oktober 2017)
- Djamal M. 2015. *Paradigma Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Faiq, Nuraini. "BKKBN Berdayakan Warga dengan Kampung KB Berhasil Tekan Angka Pernikahan Dini." <http://surabaya.tribunnews.com/2017/12/16/bkkbn-berdayakan-warga-dengan-kampung-kb-berhasil-tekan-angka-pernikahan-dini> (diakses pada tanggal 27 Oktober 2017)
- Fermana, Surya. 2009. *Kebijakan Publik Sebuah Tinjauan Filosofi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Gunawan, Imam. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Harian Buana. "Randengan Diresmikan Sebagai Kampung KB Oleh Kepala BKKBN". <http://www.harianbuana.com/2016/03/s6-2803-1730randengan-diresmikan.html>. (diakses pada tanggal 11 Desember 2017)
- Maja Mojokerto. "Tekan Laju Pertumbuhan Penduduk, Pemkot Mojokerto Luncurkan Program Kampung KB". <http://www.majamojokerto.com/agenda-index-detail/data/detail/206/5/Tekan-Laju-Pertumbuhan-Penduduk-Pemkot-Mojokerto-Luncurkan-Program-Kampung-KB#206>. (diakses pada tanggal 18 September 2017)
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Munthe, Ashiong. 2015. Pentingnya Evaluasi Program Di Institusi Pendidikan (Sebuah Pengantar, Pengertian, Tujuan dan Manfaat). *Dalam Jurnal Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pelita Harapan Tanggerang, Vol V Nomor 2*.
- Nurrohim, Hassa dan Anatan, Lina. 2009. Efektivitas Komunikasi Dalam Organisasi. *Jurnal Manajemen, Vol.7, No.4 Universitas Kristen Maranatha Bandung*
- Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mojokerto
- Peraturan Walikota Mojokerto Nomor: 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto.
- Prakastya, Fajar Adam. 2016. Kemitraan Dalam Pemberdayaan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas. *Skripsi Ilmu Administrasi Publik Universitas Brwajaya*
- Rinasti, Clara Dilasanti Putri. 2017. Pelaksanaan Program Revitalisasi Pasar Tradisional Berbasis Ekonomi Kreatif Pada Pasar Pucangsawati Di Kota Surakarta. *Skripsi Ilmu Administrasi Publik Universitas Brwajaya*
- Suartha, Nyoman. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Laju Pertumbuhan dan Implementasi Kebijakan Penduduk Di Provinsi Bali. *Dalam Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Ngurah Rai, Vol xii No 1: 1-7*.

- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Taylor, Gloria Safira. "Pemerintah Galakkan Lagi Program Keluarga Berencana". <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170426200152-255210404/pemerintah-galakkan-lagi-program-keluarga-berencana> (diakses tanggal 27 November 2017)
- Tulung, Jeane Marie. 2014. Evaluasi Program Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Di Balai Diklat Keagamaan Manado. *Dalam Jurnal Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Manado, Vol III Nomor 3*.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Konkruen antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
- Wahyuni, Sri. Peranan Koordinasi Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda*
- Zauhar, Soesilo. 1993. *Administrasi Program dan Proyek Pembangunan*. Malang: IKIP Malang